TABLOID
EDISI I/DESEMBER 2018

INDONESIA BAROKAH

MEMBUMIKAN ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN

REUNI 212: KEPENTINGAN UMAT ATAU KEPENTINGAN POLITIK?

Agenda Hizbut Tahrir Melawan Negara-Bangsa

Obor Rakyat, Asal Usul Fitnah Jokowi PKI & Antek Asing

Khawarij: Awal Radikalisme Atas Nama Islam

Membedah Hubungan Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan ISIS

TABLOID INDONESIA BAROKAH
EDISI I/DESEMBER 2018

Salam Redaksi

Tabloid Indonesia Barokah merupakan tabloid dua bulanan yang bertujuan sebagai media dakwah dan pendidikan Islam yang menyasar kalangan jama'ah masjid, lingkungan pesantren dan lingkungan pendidikan berbasis Islam lainnya.

Tabloid "Indonesia Barokah" memiliki tagline "Membumikan Islam *Rahmatan Lil 'Alamin*" yang bermakna memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat bahwa Islam adalah agama yang "*Rahmatan Lil 'Alamin*", penuh kasih sayang dan kelembutan serta jauh dari kekerasan dan radikalitas. Sehingga dengan pemahaman dan penerapan Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* ini kemudian menjadikan Indonesia yang penuh barokah.

Tujuan diterbitkannya tabloid ini adalah untuk menjawab tantangan Islam di Indonesia saat ini yang rentan dengan paham-paham radikal yang mulai menyusupi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Di mana paham tersebut bisa merusak tatanan kedamaian masyarakat Indonesia. Selain itu, tabloid ini juga bertujuan memberikan pemahaman Islam *Wasathiyah* serta mempererat tiga jenis *ukhuwah*, yaitu, *Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah* dan *Ukhuwah Basyariyah*.

Sasaran pembaca tabloid ini di antaranya adalah, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), jamaah masjid, pengurus dan pimpinan pesantren, santri, kepala madrasah dan guru madrasah serta para penyuluh agama.

Sebagai ajang promosi, terbitan perdana Tabloid Indonesia Barokah ini disebarkan secara cuma-cuma dan berharap bisa diterima masyarakat serta menjadi bacaan yang bermanfaat. Namun, Edisi selanjutnya pembaca bisa berlangganan dan menghubungi kami.

Dalam edisi perdana kali ini, kami mengangkat isu Reuni 212 yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2018 lalu. Reuni akbar tersebut disoal apakah gelaran tersebut merupakan pembelaan terhadap kepentingan umat atau hanya sebatas kepentingan politik semata. Pada reuni tersebut hadir dan memberikan orasi beberapa pimpinan partai di hadapan para peserta reuni.

Selain itu, kita mengangkat isu *hoax* yang terus menghantui masyarakat Indonesia.

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu sebuah tabloid bernama "Obor Rakyat" disebarkan ke pondok pesantren dan masjid-masjid di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Edisi pertama tabloid tersebut terbit Bulan Mei 2014. Kala itu, mengangkat judul 'Capres Boneka' dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Tim Kampanye Jokowi-JK pada saat itu langsung melaporkan beredarnya tabloid yang memuat berita *hoax* menyudutkan Jokowi. Hingga kemudian kedua redaksi tabloid tersebut ditangkap dan divonis penjara.

Namun, efek dari Obor Rakyat masih terus dirasakan hingga kini, bukan saja mengarah kepada Jokowi, tapi *hoax* menjadi senjata untuk saling menjatuhkan antar golongan.

Dari kejadian tersebut bisa kita ambil kesimpulan, menyebarkan hoax bukan saja membahayakan diri sendiri tapi dampak besar akan terjadi dan meluas hingga mengancam keutuhan bangsa.

Selain itu, Tabloid Indonesia Barokah juga memberikan informasi cara memakmurkan masjid. Hal tersebut sebagai upaya agar masjid terhindar dari paham radikalisme yang saat ini terus menjalar. Bahkan beberapa masjid diidentifikasikan sudah dijadikan sasaran sebagai penyebar paham-paham keras tersebut.

Selanjutnya, pada edisi kali ini kami mencoba mengangkat sebuah strategi kampanye politik dengan nama *firehose of falsehood* yang diduga digunakan oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Strategi yang dikemukakan oleh *Rand Corporation* ini juga yang digunakan oleh Donald Trump dalam memenangkan kontestasi politik di Amerika Serikat melawan Hillary Clinton dengan memecah belah masyarakat AS.

Pada akhirnya, kami segenap redaksi berharap semoga kehadiran tabloid ini menjadi tambahan khasanah pengetahuan bagi para pembaca.❖

Berbeda Tetap Bersatu Sebab Perbedaan Itu Sunnatullah!

"Jadi perbedaan itu memanglah sudah sunatullah. Kita memang diciptakan berbeda, jadikanlah perbedaan untuk saling mengenal dan saling melengkapi.
- Aa Gym

Daftar Isi

SUSUNAN REDAKSI
Pemimpin Umum : Moch Shaka Dzulkarnaen **Pemimpin Redaksi:** Ichwanuddin **Redaktur Pelaksana :** Khusnaedi
Dewan Redaksi : Bahrul Ulum, Oky Ardianto, Ely Kaniasih **Sekretaris Redaksi:** Aini Rahman
Fotographer: Eko Budianto, Abdullah Nasution
Distribusi & Sirkulasi: M. Anwar Sadat, Husein Abdillah **Creative Designer:** Guntur Subekti, Nofriansyah
Alamat Redaksi: Jalan Haji Kerenkemi, Rawa Bacang, Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi
Email : indonesiabarokah@gmail.com
Pemasaran : 082114662933 (Reny Fitriani)

Indonesia Barokah @indonesiabarokah @indonesiabarokah

10 Tokoh Islam Dinobatkan Jadi Pahlawan Nasional di Era Jokowi

Selama menjabat menjadi presiden, Jokowi memberikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh Islam. Di antaranya:

1. KH. Abdul Wahab Chasbullah

KH. ABDUL WAHAB CHASBULLAH lahir di Jombang, 31 Maret 1888 dan meninggal 29 Desember 1971 pada usia 83 tahun. Beliau adalah ulama pendiri Nahdlatul Ulama dan pengarang syair "*Syubbanul Wathon*" yang sering disenandungkan oleh kalangan nahdliyin.

KH. Abdul Wahab Chasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern, dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu harian umum "Soeara Nahdlatul Oelama" atau Soeara NO dan Berita Nahdlatul Ulama. Bersama dengan KH. Hasyim Asy'ari menghimpun tokoh pesantren dan keduanya mendirikan Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada tahun 1926. Kyai Wahab juga berperan membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

2. Lafran Pane

LAFRAN PANE lahir di Kampung Pagurabaan, Kecamatan Sipirok, yang terletak di kaki gunung Sibual-Bual, 38 kilometer ke arah utara dari Padang Sidempuan, Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan, dia merupakan tokoh pendiri organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang merupakan organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia.

Sebenarnya Lafran Pane lahir di Padangsidempuan 5 Februari 1922. Untuk menghindari berbagai macam tafsiran, karena bertepatan dengan berdirinya HMI Lafran Pane mengubah tanggal lahirnya menjadi 12 April 1923. Sebelum tamat dari STI, Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik (AIP) pada bulan April 1948. Setelah Universitas Gajah Mada (UGM) dinegerikan tanggal 19 Desember 1949, dan AIP dimasukkan dalam Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial Politik (HESP).

3. TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

TUAN GURU KYAI HAJI (TGKH) MUHAMMAD ZAINUDDĪN ABDUL MADJID dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 5 Agustus 1898 dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Madjid (beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Guru Mu'minah atau Guru Minah) dengan seorang wanita shalihah bernama Hajah Halimah al-Sa'diyyah.

Dia adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan merupakan pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi massa Islam terbesar di provinsi tersebut. Di pulau Lombok, Tuan Guru merupakan gelar bagi para pemimpin agama yang bertugas untuk membina, membimbing dan mengayomi umat Islam dalam hal-hal keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yang di Jawa identik dengan Kyai.

4. Sultan Mahmud Riayat Syah

SULTAN MUHAMMAD SYAH atau yang lebih dikenal dengan Sultan Mahmud Riayat Syah adalah raja terakhir dari Kesultanan Malaka. Dia terpilih menjadi raja karena menggantikan ayahnya, Sultan Alauddin Riayat Syah I, melangkahi saudaranya yang lebih tua, yakni Munawar Syah.

Sebagai pemimpin tertinggi Kerajaan Johor-Riau-Lingga dan Pahang, Mahmud Riayat Syah atau Sultan Mahmud Syah III terlibat dalam pertempuran melawan penjajah Belanda di antaranya perang di Teluk Riau dan Teluk Ketapang Malaka pada tahun 1784.

5. Abdurrahman Baswedan

AR. BASWEDAN lahir di Surabaya pada 9 September 1908 dan meninggal di Jakarta pada 16 Maret 1986. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalig, dan juga sastrawan Indonesia. AR. Baswedan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir, Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota Dewan Konstituante. AR. Baswedan adalah salah satu diplomat pertama Indonesia dan berhasil mendapatkan pengakuan *de jure* dan *de facto* pertama bagi eksistensi Republik Indonesia dari Mesir.

6. Pangeran Mohammad Nur

PANGERAN MUHAMMAD NOOR lahir di Martapura, Hindia Belanda, 24 Juni 1901 dari keluarga bangsawan Banjar, karena ia adalah intah (cucu dari cucu) Raja Banjar Sultan Adam al-Watsiq Billah.

Pendidikan dasarnya beliau selesaikan di HIS, lulus tahun 1917. Kemudian meneruskan ke jenjang MULO dan lulus tahun 1921, lalu lulus dari HBS tahun 1923, dan pada tahun 1923 masuk *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (THS) - sekolah teknik tinggi di Bandung. Pada tahun 1927, ia berhasil meraih gelar Insinyur dalam waktu empat tahun sesuai masa studi, setahun setelah Ir. Soekarno (Presiden RI pertama) lulus sebagai insinyur dari TH Bandung.

7. Depati Amir

DEPATI AMIR merupakan salah satu pejuang Bangka yang heroik. Ia dikenal ahli strategi perang melawan Belanda di Bangka Belitung.

Depati Amir merupakan putra dari Depati Bahrin. Depati Amir aktif melawan penjajahan Belanda di Bangka. Karena geraknya yang sangat mengkhawatirkan akhirnya ia diasingkan di Desa Air Mata, Kupang, NTT.

Depati Amir tercatat ikut berjuang menentang penjajahan Belanda dalam rentang tahun 1820 – 1828 bersama saudaranya Depati Hamzah. Kedua bersaudara ini bertindak sebagai panglima tempur di bawah komando ayah mereka, Depati Bahrin.

8. Agung Hajjah Andi Depu

AGUNG HAJJAH ANDI DEPU (lahir di sebuah Desa di Kecamatan Tinambung, Polman, Agustus 1908) adalah pejuang perempuan yang berasal dari tanah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Beliau memimpin organisasi gerakan perlawanan yang dibentuk, Kris Muda Mandar untuk mengusir penjajahan Belanda dari Indonesia di tanah Sulawesi. Andi Depu dikenang melalui Monumen Merah Putih Andi Depu di Tinambung, Polman.

9. Mr. Kasman Singodimedjo

Mr. KASMAN SINGODIMEDJO adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II. Selain itu, ia juga adalah Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang menjadi cikal bakal dari DPR.

Kasman Singodimedjo telah aktif dalam organisasi Muhammadiyah sejak masa mudanya dan mengenal secara dekat tokoh-tokoh besar Muhammadiyah seperti KH. Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo. Selain itu sejak 1935, ia telah aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, terutama di Bogor yang sekarang markasnya menjadi Museum Perjuangan Bogor.

Pada 1938, Kasman Singodimedjo ikut membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta bersama KH. Mas Mansur, Farid Ma'ruf, Soekiman, dan Wiwoho Purbohadidjoyo. Pada Muktamar 7 November 1945 Kasman terpilih menjadi Ketua Muda III Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pengurus lain pada saat itu adalah KH. Hasyim Asy'ari (Ketua Umum), Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Muda I), KH. Wahid Hasyim (Ketua Muda II), Mr. Moh. Roem, M.

10. Brigjen KH Syam'un

KH. SYAM'UN lahir di Beji, Bojonegara, Serang, Banten, 5 April 1894 dari pasangan taat beragama H. Alwiyan dan Hj. Hajar. Brigjen KH. Syam'un masih keturunan dari KH. Wasid tokoh "Geger Cilegon" 1888 (perjuangan melawan Pemerintah Kolonial Belanda).

Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) KH. Syam'un adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan menentang pemerintahan Hindia Belanda di Banten. Beliau pendiri Perguruan Tinggi Islam Al Khairiyah Citangkil, Kota Cilegon. Tak hanya aktivis pendidikan Islam, KH. Syam'un adalah pejuang sekaligus pendiri kesatuan Divisi Siliwangi.

KH. Syam'un pernah bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA), sebuah gerakan pemuda bentukan Jepang. Dalam PETA, jabatan KH. Syam'un adalah *Dai Dan Tyo* yang membawahi seluruh *Dai Dan I* PETA Wilayah Serang. ❖

EDISI I/DESEMBER 2018

Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?

Capres Prabowo melakukan orasi di depan massa Reuni 212

Aksi 212 2 Desember 2016 menjadi momentum bersejarah bangsa Indonesia yang tak akan pernah dilupakan, khususnya bagi umat Islam Indonesia sebagai pemeluk Islam terbesar di dunia. Secara mendasar, sebenarnya tak ada masalah dengan Aksi 212, karena aksi tersebut adalah gerakan yang mampu menyatukan dan membela umat Islam. Aksi 212 sebagai gerakan moral keagamaan sebelumnya dimotori oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin, melalui Fatwa MUI yang dijadikan dasar. Tapi sekarang yang dipersoalkan adalah untuk apa dibuat reuninya, sedangkan pokok persoalan dan tuntutan Aksi 212 sudah terselesaikan.

Sampai hari ini masih banyak yang mempertanyakan, kenapa harus ada Reuni 212?, apa sebenarnya tujuan dan motifnya?. Pasalnya sekarang adalah tahun politik dan masuk masa kampanye, spekulasi-spekulasi mempersoalkan Reuni 212 pun bermunculan dan tidak bisa dibendung. Pertanyaan yang lahir dari kegelisahan masyarakat tersebut tentu harus dijawab dan gamblang, tentu dengan menyajikan fakta-faktanya, bukan menghadirkan hal fiktif yang mendangkalkan akal dan pengetahuan.

Jauh-jauh hari sebelum Reuni 212 digelar, tersiar informasi akan ada panitia khusus menggarap peringatan 2 tahun Aksi 212, yang katanya bertujuan membela Islam, membela tauhid dan dalih lain yang dibuat seolah-olah atas nama *amar ma'ruf nahi mungkar.*

Banyak yang janggal pada Reuni 212 kemarin, salah satunya dengan hadirnya Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang kemudian menyampaikan pidato. Tidak hanya Prabowo, hadir juga para pimpinan ormas, pimpinan daerah dan pimpinan partai pendukung Prabowo-Sandi. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya, Ismail Yusanto (Juru Bicara organisasi terlarang HTI), Anies Baswedan (Gubernur DKI), Amien Rais (Ketua Dewan Kehormatan PAN), Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua Majelis Syuro PKS), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Gerindra), Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS) dan masih banyak lainnya. Mayoritas mereka tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"Rasulullah banyak mendapat kemenangan dalam berjihad, apakah pernah membuat reuni? Apakah Nabi membuat reuni Perang Uhud, reuni Perang Badar, reuni Perang Hunain, reuni Haji Wada' dan reuni turunnya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan sempurnanya agama? Tidak ada."

Ustadz Farhan Abu Furaihan, Alumni Darul Hadits, Yaman, asal Aceh

Kedatangan Prabowo Subianto sontak mengagetkan banyak pihak, sebab jika acaranya memang Reuni 212, kenapa orang yang tidak pernah ikut Aksi 212 tahun 2016 diundang dan memberikan sambutan. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni yang pernah datang di Aksi 212, justru batal diundang, apa karena Prabowo takut kalah pamor dengan Jokowi yang dianggap saingan beratnya?, sehingga Reuni 212 hanya dijadikan panggung politik untuk Prabowo. Aroma kampanye terselubung tercium amis dan tak terbantahkan.

Tanggapan Reuni 212

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai kegiatan Reuni 212 sudah kehilangan esensinya. Bahkan, kegiatan itu sudah melenceng ke arah politik. "Dari hasil pengamatan kami, kegiatan Reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018), dilansir dari *kompas.com.*

Tak ketinggalan, melalui akun twitternya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyampaikan, ukuran keimanan tidak bisa ditentukan dari hadir atau tidaknya di acara Reuni 212. Pernyataan Mahfud MD, menanggapi netizen yang mengatakan bahwa kedatangan Reuni 212 digerakkan oleh keimanan.

"Hadir ke Reuni 212 bukan ukuran keimanan. saya yakin banyak yang tidak hadir di sana imannya lebih kuat dan lebih paham urusan agama dari pada umumnya yang hadir. Sebaliknya banyak juga yang hadir di sana imannya tak lebih kuat. Jadi tak bisa digebyah-uyah sesederhana itu. 212 bukan soal iman," kicau Mahfud.

Ustadz Farhan Abu Furaihan, asal Aceh, dengan tegas mengatakan, tidak perlu dan tidak penting adanya Reuni 212, "Rasulullah banyak mendapat kemenangan dalam berjihad, apakah pernah membuat reuni?, apakah Nabi membuat reuni Perang Uhud, reuni Perang Badar, reuni Perang Hunain, reuni Haji Wada' dan reuni turunnya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan sempurnanya agama? Tidak ada," tandasnya.

Ia menjelsaskan bahwa hal demikian tidak ada esensinya sama sekali dalam agama. Lebih lanjut, Ustadz Farhan mengingatkan di tahun politik lebih baik semakin mendekatkan diri pada Allah, agar tidak mudah diadu domba.

"Hati-hati kita sekarang di hari-hari politik. Kita berdo'a pada Allah menjaga muslimin yang ada di Indonesia dari tangan-tangan mereka yang ingin mengorbankan darah kaum muslimin demi kepentingan politiknya," imbuhnya.

Ustadz alumni Darul Hadits, Yaman itu melihat, bahwa Reuni 212 sarat motif politik dan membuat umat terkotak-kotak karena beda pilihan politik. "Katanya menyuruh kepada persatuan, kok malah pada perpecahan. Katanya harus saling menjaga ukhuwah, jangan saling menyesatnyesatkan, kok pas beda pendapat dalam masalah politik kamu tidak menerima jenazahnya. Kamu tidak mau memandikan jenazahnya, kamu keluarkan dia dari daerahmu," pungkasnya.

Selain itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie juga menilai, kegiatan Reuni 212 tidak produktif. "Aspirasi itu harus dihargai, semua orang harus menghargainya. Cuma kalau terus menerus kegiatan Reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11/2018) dikutip dari *kompas.com.*

Kilas Balik Reuni 212 tahun 2017

Kenapa Reuni 212 terus diselenggarakan setiap tahunnya?, apa sebenarnya tujuannya?. Untuk menguak motif Reuni 212 ke-2 yang baru digelar kemarin, tentu akan lebih jelas jika ditelusuri Reuni sebelumnya, yakni Reuni 212 ke-1 di tahun 2017 lalu, karena kedua reuni tersebut mempunyai motif yang sebenarnya sama.

Sebagai gerakan mobilisasi massa, tentu tidak lepas dari panitia penyelenggara yang menggerakkannya. Berdasarkan penelusuran kepanitiaan Reuni 212 tahun 2017 lalu, menunjukkan Reuni 212 bukan gerakan moral keagamaan yang selama ini sering diklaim, tapi terindikasi kuat pada gerakan pengerahan massa untuk kepentingan politik praktis.

Nama-nama dengan kontak nomor handphone yang tercantum pada pamflet Reuni 212 tahun 2017, setelah dilacak kontak dan akun media sosialnya, menunjukan alamat basis suara Prabowo Subianto dan terindikasi kuat mempunyai kedekatan dengan partai pengusung Prabowo pada Pemilu 2014. Nama-nama tersebut mengatasnamakan, Ramdoni, Dhani, Iyus, Halim dan Faisal.

Ramdoni setelah dilacak ternyata tinggal di Bogor, menjabat sebagai CEO dan OFE di Menara Sukses Mulia, dalam Facebooknya ia menyukai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fahri

"Hadir ke Reuni 212 bukan ukuran keimanan. Saya yakin banyak yang tidak hadir di sana imannya lebih kuat dan lebih paham urusan agama daripada umumnya yang hadir. Sebaliknya banyak juga yang hadir di sana imannya tak lebih kuat. Jadi tak bisa digebyah-uyah sesederhana itu. 212 bukan soal iman."

Mahfud MD
Mantan Ketua MK

“Dari hasil pengamatan kami, kegiatan Reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik,"

Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei

Hamzah. Dhani, setelah ditelusuri adalah seorang praktisi ruqyah, dia juga berhubungan dengan Majelis Ta'lim Abu Hanifah, Bogor yang menduduki jabatan Ketua Komisi 4 MUI Bogor dan Ketua 3 DDII Bogor. Iyus, setelah ditelusuri kontaknya, ditemukan nomor tersebut merupakan kontak Bidik Global yang beralamat di Menara Masjid Raya Bogor Lt.2, Jalan Pajajaran 10, Bogor Kode pos 16143. Halim dan Faisal juga terdeteksi beralamatkan Bogor.

Bogor tidak lain adalah basis massa Partai Gerindra dan PKS yang menjadi lumbung suara Prabowo di Pemilu 2014. Sampai sekarang pun, basis tersebut terus dipertahankan dan digarap. Faktanya, banyak warga Bogor selalu dimobilisasi besar-besaran dan difasilitasi dalam aksi serupa, salah satunya di Reuni 212 ke-2 kemarin.

Sudah sangat jelas dan terang benderang, Reuni 212 pada 2 Desember 2018 kemarin adalah sebuah gerakan politik, bukan aksi bela Islam atau aksi bela tauhid yang selama ini dijadikan topeng. Tanpa bermaksud menihilkan jama'ah yang hadir di Reuni 212, karena sebagian besar dari mereka hanya korban provokasi yang tidak mengerti persoalan dan motif sebenarnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, Reuni 212 tidak lagi menjadi gerakan moral, tetapi merupakan gerakan politik. Pasalnya, dalam acara tersebut sarat dengan unsur-unsur politik.

“Kami sudah sampaikan bahwa Reuni 212 ini bukan lagi gerakan moral, tetapi gerakan politik yang memang bertujuan memenangkan pasangan Capres-Cawapres tertentu,” ujar Boni dalam acara diskusi publik, di Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018), dikutip dari *beritasatu.com*.

“Lebih kongkritnya, ada pemutaran lagu '2019 Ganti Presiden',” imbuhnya.

Masih percaya Reuni 212 adalah aksi bela Islam dan aksi moral keagamaan?. Renungkan dengan hati yang tertata dan berfikirlah lebih jernih, jangan hanya melihat dan mendengar apa yang ada di dipermukaan, tapi cari tahu dan pahami kebenaran yang sebenar-benarnya.❖

Prabowo Marah Media Dibelah

Prabowo Subianto kembali berulah dengan marah-marah dan melontarkan pernyataan kontroversial. Kali ini Capres nomor urut 02 itu menuding media tidak memberitakan jumlah massa Reuni 212 yang diklaim Prabowo mencapai 11 juta orang.

“Mereka (media) mau katakan yang 11 juta hanya 15 ribu. Bahkan ada yang bilang kalau lebih dari 1.000,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu, di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu 5 Desember, dilansir dari *tirto.id*

Klaim jutaan orang di Reuni 212 tidak hanya datang dari Prabowo. Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan, lebih dari 7 juta orang menghadiri Reuni 212. “Ada delapan juta orang yang ikut di acara ini,” ujar Bernard pada *tirto.id*.

Tak mau ketinggalan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengklaim, Reuni 212 merupakan aksi dengan jumlah massa terbesar di dunia.

“Saya kira pertemuan Reuni 212 ini adalah sebuah rekor yang sangat besar yang terjadi di Indonesia. Dan mungkin terbesar di planet bumi," tuturnya pada *tribunnews.com*.

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS), jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2017 mencapai 10,37 juta jiwa. Tahun 2018 tentunya bertambah, bisa kisaran 11 juta, tapi yang jelas masih dalam perhitungan yang masuk akal.

Kemarahan Prabowo semakin mengarah bahwa Prabowo berperan besar dalam menggerakkan Reuni 212 yang digelar, di kawasan Monumen Nasional, Minggu (2/12/2018) lalu.

Data tersebut menunjukkan, klaim Prabowo yang menyebut 11 juta orang hadir di Reuni 212 tidak rasional dan sangat hiperbola. Tidak mungkin 11 juta manusia tertampung di kawasan Monas, karena 11 juta masuk kisaran jumlah penduduk DKI Jakarta saat ini.

Berapapun massa yang datang di Reuni 212, kenapa Prabowo harus marah-marah ke media yang memberitakan jumlahnya, media juga punya perkiraan dan perhitungan sendiri yang harus dihargai.

Kemarahan Prabowo Subianto semakin menunjukan bahwa dia mempunyai kepentingan besar di balik Reuni 212, apalagi Prabowo dipanggungkan di acara tersebut. Hal itu semakin memperlihatkan Prabowo berperan penting menggerakkan Reuni 212, pada Minggu 2 Desember 2018.

Selain itu Prabowo dikenal sebagai tokoh yang temperamental (mudah emosi) dan sering marah ke wartawan media, bahkan belum lama ini tim Prabowo memboikot salah satu media swasta dengan tuduhan merugikan Prabowo.

Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi menilai Prabowo sedang memainkan teori *bandwagon effect*. Menurut Arya, efek ini bekerja bagi pemilih yang minim informasi dan mudah terbawa pada kandidat yang dianggap disukai banyak orang.

Arya memaparkan, jika jumlah massa yang banyak berkumpul di satu tempat dan berkonsolidasi untuk basis Prabowo, jumlah massa tersebut akan mempengaruhi persepsi pemilih lainnya, terutama pemilih di luar Jakarta yang hanya bisa melihat Reuni 212 dari layar kaca.

“Seperti dalam massa yang berkumpul untuk kandidat tertentu. Itu mengapa bagi Prabowo jumlah massa 11 juta itu sangat penting,” kata Arya pada *tirto.id*.

Arya mengatakan, semakin tinggi angka yang hadir di media, maka akan bisa menciptakan efek elektoral yang tinggi pula. Hal itu, kata Arya, membuat Prabowo memiliki kesan banyak pengikut dan disukai banyak orang.

“Dia tahu survei enggak menang, makanya dia pakai massa seperti itu. Itu bisa jadi legitimasinya,” pungkas Arya.❖

Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik ?

Membongkar Strategi Semprotan Kebohongan
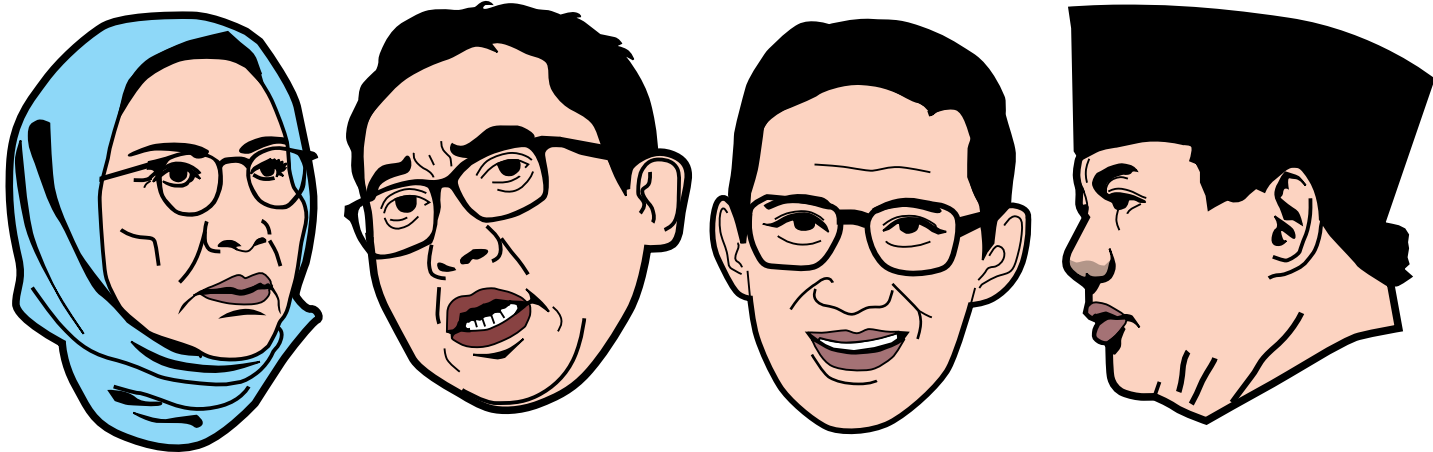
Pada Sabtu 21 Juni 2018 lalu, publik diramaikan dengan berita "Mobil Neno Warisman Dibakar". Neno yang merupakan salah seorang penggagas gerakan #2019-GantiPresiden di channel Youtube, *Voa Islam TV* menceritakan bahwa sebelum kejadian terbakarnya mobil miliknya yang diparkir di depan rumah, di kawasan Cimanggis, Depok Jawa Barat sempat terlihat beberapa orang tak dikenal menyatroni rumahnya.

Neno menceritakan, seolah-olah ada orang yang sedang mengintimidasi hingga kemudian dengan mudahnya mengarahkan jika mobil yang terbakar benar-benar dibakar oleh seseorang yang tidak suka dengan kegiatannya menyuarakan #2019Ganti-Presiden.

Fadli Zon sahabat-nya pun bereaksi melalui cuitan di Twitter dengan pernyataan provokatif.

"Dapat kabar dari Mbak Neno Warisman, mobilnya ada yang ledakkan/ bakar.

Kalau ini teror maka jelas perbuatan pengecut.

Maju terus Mbak, jangan takut," tulis Fadli Zon.

Namun ternyata, mobil inisiator #2019GantiPresiden yang diakui sebelumnya dibakar terbukti terbakar akibat korsleting.

"Hasil identifikasi dari bengkel, kebakaran dipicu oleh aki yang korslet. (Kabel aki) yang positif nempel di

bodi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono seperti dikutip detik Sabtu (21/7/2018).

Sebelum itu, Prabowo melalui akun Facebook Partai Gerindra menebar ketakutan pada masyarakat dalam pidatonya dengan pernyataan "Indonesia Bubar tahun 2030".

Prabowo juga mengiringi pernyataan "Indonesia Bubar" dengan ungkapan yang menyudutkan pemerintahan saat ini.

Berikut cuplikan Pidato Prabowo:

Saudara-saudara! Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030.

Bung! Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian!

Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas! Semakin maling! Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi.

Sangat disayangkan, selain mencerminkan nilai-nilai pesimisme, di balik isi pidato Prabowo tersebut menebar ketakutan kepada publik, mengandung kebohongan-kebohongan dan mengarahkan kebencian kepada pemerintahan.

Bulan Oktober lalu, Publik dikejutkan dengan serangkaian kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dipukuli oleh orang-orang tak dikenal di Bandung yang kemudian direaksi oleh Prabowo dengan melakukan konferensi pers. Tak berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya, di depan media Prabowo mengarahkan publik bahwa Ratna menjadi korban kriminalisasi pihak tertentu.

Meskipun tidak menyebutkan secara spesipik siapa pelaku penganiayaan, dengan melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa Ratna Sarumpaet adalah bagian dari pimpinan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur tentu sudah mengarahkan bahwa pemerintahan saat inilah yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada publik, tak terkecuali kepada Ratna Sarumpaet yang merupakan salah seorang tim kampanyenya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko mengatakan kasus kabar bohong (hoax) Ratna Sarumpaet dinilai sengaja ditimbulkan untuk membuat kegaduhan.

Menurutnya, isu sengaja didesain agar ada anggapan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengancam hidup masyarakat Indonesia.

"Fenomena menggunakan kutipan sebuah peristiwa yang tidak bisa dicek kebenarannya kemudian digoreng lagi

memang adalah fenomena untuk mengeksploitasi dan memanipulasi sifat emosional orang. Dan itu biasanya memang sudah dipetakan," kata Budiman di Jakarta, Jumat (5/10) seperti dikutip *mediaindonesia.com*.

Dari serangkaian kejadian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada agenda membohongi publik yang dilakukan secara struktur dan masif, yang kemudian para pengamat politik menduga jika Prabowo menggunakan strategi kotor semprotan kebohongan atau ***"Firehose of Falsehood"*.**

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Gajah Mada Analitika, Herman Dirgantara menyebut teknik propaganda '*firehose of falsehood*' sebagai strategi kampanye kotor.

"Teknik propaganda '*firehose of falsehood*' itu sebetulnya merupakan teknik strategi perang non-konvensional atau kotor. Sehingga tepat jika kasus drama Ratna Sarumpaet tidak berhenti pada satu orang saja. Perlu ditelusuri." ujar Herman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/10/2018).

Dikatakannya, teknik propaganda itu memiliki dua tujuan utama yakni menciptakan persepsi publik yang merugikan lawan politik dan menciptakan narasi kebohongan yang dilakukan secara terus menerus sehingga menimbulkan simpati publik bagi yang menggunakan teknik tersebut.

"Jadi ada tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, menciptakan persepsi publik yang merugikan lawan politik. Kedua, di sisi lain pihak yang menggunakan agar mendapat simpati. Narasinya melalui kebohongan bersifat '*continue*' (terus menerus) yang menciptakan sudut pandang. Kalau memang terindikasi, saya katakan pemilu 2019 kita berada dalam ancaman serius," tegas Herman seperti dikutip *nusantaranews.com*

Strategi Kotor yang Terbukti Ampuh

Firehose of falsehood atau "semprotan kebohongan" dikemukakan pertama kali oleh **Rand Corporation** sebagai analisa penelitian terkait terpilihnya Donald Trump yang mirip dengan metode yang digunakan Vladimir Putin saat penggabungan Crimea (2014) dan Georgia (2008).

Dalam publikasinya, **Rand Corporation** melalui Christoper Paul dan Miriam Matthews menjelaskan bahwa Rusia menggunakan teknik kebohongan yang diproduksi secara masif melalui media-media pemberitaan yang mereka miliki. Kemudian teknik ini diadopsi oleh Donald Trump pada saat Pilpres AS. Terbukti strategi kotor ini kemudian memenangkan Donald Trump dari lawannya.

Pada dasarnya, teknik ini menggunakan *obvious lies* atau kebohongan tersurat yang direncanakan untuk membangun ketakutan publik. Sebagai propaganda, cara ini dinilai sangat efektif

sebab memengaruhi bagian otak yang disebut *amygdala* – bagian otak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi rasa takut dan mempersiapkan diri pada kondisi darurat.

Sementara itu, untuk bekerja secara efektif, *obvious lies* memiliki empat karakter kunci.

Pertama, diproduksi secara masif dan disebarkan melalui berbagai media pemberitaan. Artinya, informasi fiktif diproduksi dengan kuantitas tinggi dan disiarkan melalui banyak media berupa teks, audio dan video.

Kedua, bergerak de-ngan cepat, terus menerus dan berulang. Artinya, pemberitaan ini harus diberita-kan dengan masif, terus menerus dan berulang.

Kemudian yang **ketiga**, tidak adanya komitmen pada realita atau fakta. Artinya memproduksi propaganda ini acuh kepada komitmen. Kendatipun kebohongan itu mudah dibongkar, mereka akan cuek dan melenggang

kangkung.

Dan yang **terakhir**, karakter ini tidak memiliki komitmen pada konsistensi. Artinya, konsistensi pada berita bohong yang diproduksi adalah persoalan belakangan, bisa saja dalam sekejap berita itu diklarifikasi dengan pernyataan berbeda, namun kebenaran berita tersebut juga belum bisa dibuktikan. Yang terpenting adalah berita pertama sudah tersebar dan didistribusikan dengan metode seperti pada karakter pertama dan kedua.

Pertautan empat karakter tersebut penting dan akan efektif memainkan isu yang beredar. Perpaduan antara prinsip iklan dan kelonggaran dalam konsistensi ini menimbulkan perpaduan yang aneh, namun efektif untuk menciptakan kebimbangan dan rasa takut pada masyarakat.

Tentu saja, dua karakter terakhir menjadi menarik untuk memainkan peran dalam membentuk propaganda. Jika merujuk pada penelitian Standford History Education Group, masyarakat cenderung mudah menerima berita bohong atau hoax karena adanya keputusan dari dalam diri untuk membiarkan hal-hal yang sebenarnya keliru mengambil alih pikiran.

Ada kecenderungan alami manusia untuk mengedapankan emosi ketimbang rasional, sehingga biasanya seseorang akan mencari jawaban yang paling mudah atau yang paling sesuai dengan preferensi dirinya, misalnya tentang keyakinan politik.

Hal ini sejalan dengan cara kerja keempat karakter yang disebutkan sebelumnya, sebab secara psikologis, *obvious lies* akan menyerang *amygdala* dalam struktur otak, sehingga mudah untuk membangun sebuah ketakutan.

Keempat karakter *Obvious Lies* tersebut sangat mirip dengan langkah-langkah yang dilakukan kubu Prabowo di antaranya tergambar pada beberapa kejadian berikut:

Pertama, pengakuan Neno Warisman yang terus diintimidasi dan ditolak ketika menginisiasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah, hingga pada puncaknya mengaku mobilnya dibakar orang tidak dikenal. Namun, kenyataannya mobil Neno bukan dibakar, tetapi terbakar karena korsleting.

Kedua, Prabowo menebarkan ketakutan dengan memberikan pernyataan "Indonesia Bubar" yang kemudian menyudutkan pemerintah bahwa tanah Indonesia 80 persen dikuasai asing, kekayaan Indonesia sudah dikuasai asing dan lain sebagainya yang jelas-jelas sudah membohongi publik.

Ketiga, kasus Ratna Sarumpaet yang *notabene* bagian dari Pimpinan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang mengaku dipukuli orang tak dikenal di Bandung berujung pada kecaman Prabowo melalui konferensi pers nya. Meskipun akhirnya Prabowo melakukan klarifikasi setelah terbukti Ratna hanya operasi pelastik dan bukan korban pemukulan.

Keempat, pernyataan Sandiaga Uno tentang tempe setipis ATM dan harga-harga di pasar terus naik yang jelas-jelas membohongi publik dan menebarkan ketakutan pada masyarakat kecil bahwa perekonomian Indonesia terpuruk. Padahal beberapa survei menegaskan jika perekonomian di era Jokowi membaik dan harga-harga stabil.

Dan masih banyak lagi, langkah-langkah Prabowo lainnya yang sesuai dengan karakter *Obvious Lies.*

Publik Jadi Korban Kebohongan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon membantah bahwa kubu Prabowo-Sandi sengaja menciptakan kabar palsu Ratna Sarumpaet sebagai bagian dari Teknik Propaganda *'firehose of falsehood'.*

"Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Kita orang yang murni-murni saja dan enggak biasa berbohong. Itu bisa diselidiki lah. Kita ini dibohongi dan tidak mungkin kita membohongi rakyat," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2018) seperti yang dilansir *tribunnews.com*

Fadli juga membantah Koalisi Indonesia Adil Makmur menggunakan jasa konsultan politik asing yang memenangkan Donald Trump.

Konsultan politik itu disebut menggunakan teknik propaganda *'firehose of falsehood'* dalam memenangkan Trump pada Pilpres Amerika serikat 2016 lalu.

"Enggak ada. Setahu saya enggak ada. Kita pakai lokal-lokal saja," katanya.

Pada akhirnya, publiklah yang menjadi korban dari strategi *'firehose of falsehood'* ini. Publik dihadapkan pada kondisi kebingungan yang disebabkan kebohongan-kebohongan masif dan struktur, diberikan ancaman dan ketakutan secara terus menerus sehingga masyarakat mengambil keputusan yang tidak memerlukan pertimbangan dan kajian mendalam yang berakibat pada pengambilan keputusan termudah. Yaitu mempercayai berita bohong yang tersebar.

Artinya, strategi Prabowo bukan saja mengancam lawan politiknya, tetapi masyarakat yang menjadi korban, membohongi publik secara masif dan terstruktur dengan tujuan menyebarkan ketakutan untuk memenangkan kontestasi politik.❖

MEMBONGKAR STRATEGI FIREHOSE OF FALSEHOOD PRABOWO-SANDI

Firehose of Falsehood : Teknik kebohongan yang diproduksi secara masif untuk membangun ketakutan publik

KARAKTERISTIK :	STRATEGI PRABOWO-SANDI YANG MIRIP DENGAN KARAKTERISTIK OBVIOUS LIES :
1. Dilakukan secara masif melalui sumber pemberitaan	1. Mobil Neno Warisman dibakar
2. Ketiadaan komitmen pada Fakta (realita)	2. Indonesia bubar tahun 2030
3. Dilakukan secara cepat, terus menerus dan berulang	3. Harga-harga di pasar naik
4. Tidak konsisten pada informasi	4. Tempe setipis ATM
	5. Ratna Sarumpaet dipukuli

Membedah Hubungan Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan ISIS

Membaca gerakan sosial dan politik Islam dewasa ini, kiranya tidak dapat dipisahkan dari peristiwa masa lalu pasca runtuhnya Turki Utsmani, karena ada semacam akar historis yang saling terhubung antara satu dengan lainnya.

Runtuhnya Turki Utsmani ini memiliki implikasi politik yang cukup serius. Terbukti setelah empat tahun keruntuhannya, muncul gerakan sosial keagamaan di Mesir bernama Ikhwanul Muslimin. Tujuan utama dari gerakan ini adalah bercita-cita membangkitkan kekhilafahan Is-lam setelah sebelumnya mengalami kekosongan pada setengah dasawarsa terakhir. Selain itu, berdirinya Ikhwanul Muslimin didasari atas rasa prihatin Hasan al-Banna terkait kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Mesir, juga sebagai reaksi atas penjajahan Inggris saat itu.

Ikwanul Muslimin menjadi semacam embrio atas lahirnya gerakan-gerakan politik Islam setelahnya. Selain itu Ikhwanul Muslimin juga terkoneksi dengan pendahulunya yaitu Wahabi, sebuah gerakan yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1701-1793 M). Gerakan ini adalah pemurnian Islam dari berbagai bentuk takhayul, bidah dan khurafat. Koneksi antara Wahabi dan Ikhwanul Muslimin terjadi akibat adanya kedekatan ideologis, yaitu sama-sama memiliki ambisi kekuasaan sentralistik yang berorientasi pada kepemimpinan internasional dan formalisasi agama.

Alasan kedekatan ideologi personal inilah hubungan bilateral antara Ikhwanul Muslimin dengan Wahabi dapat terjalin, setidaknya sejak tahun 1954 M. Ketika Said Ramadhan salah satu menantu Hasan al-Banna mencari suaka politik ke Arab Saudi, akibat langkah represif pemerintahan Naseer yang banyak memenjarakan para tokoh Ikhwanul Muslimin. Kedekatan ini kemudian dimanfaatkan Wahabi untuk membiayai Said Ramadhan ke Jenewa guna menyebarkan ideologi Wahabi-Ikhwanul Muslimin pada Umat Islam Eropa.

Selain Said Ramadhan yang melarikan diri ke Arab Saudi adalah Muhammad Quthb, adik kandung Sayyid Quthb. Muhammad Quthb ini nantinya menjadi Dosen di Universitas King Abdul Aziz, Jedah. Salah satu muridnya adalah Osama bin Laden, Pimpinan Al-Qaedah. Sedangkan kakaknya, Sayyid Quthb adalah Pembesar Ikhwanul Muslimin yang menulis karya *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, dan *Ma'alim fi Thariq*. Dari *magnum opus*-nya itu kemudian banyak mengilhami pemikir radikal, seperti Syukri Musthafa pendiri gerakan Tarjih wal Hijrah, Abdullah Azam salah satu pendiri Al-Qaedah dan lain-lain. Sedangkan Al-Qaedah sendiri memiliki banyak jaringan bawah tanah, salah satunya adalah ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) pimpinan Ibrahim bin Awwad bin Ibrahim bin Ali bin Muhammad al-Badri (Abu Bakar Al-Baghdadi). Selain itu, dari rahim Ikhwanul Muslimin juga lahir Hizbut Tahrir yang sekarang menjadi organisasi terlarang di mana-mana. Alasan Taqiyuddin al-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir tahun 1952, karena merasa Ikhwanul Muslimin terlalu akomodatif pada 'Barat' dan semakin tercemarnya umat Islam dengan pemikiran sosialisme, nasionalsime maupun sektarianisme. Singkatnya berbagai gerakan radikal tersebut ternyata memiliki akar historis dan mata rantai keilmuan yang sama.

Terlepas dari pedekatan hirarki sejarah di atas, kiranya perlu meminjam pendekatan *islamisme* dan *revivalisme*, sehingga berbagai aliran itu dapat dilihat seperti bangunan utuh. Di mana ragam gerakan ini pada puncaknya akan membentuk piramida Islamis. Misalnya kelompok Wahabi yang mengambil fokus gerakannya pada masyarakat bawah, dengan menciptakan majelis-majelis taklim, lembaga pendidikan, institusi kesehatan dan lain sebagainya. Gerakan ini dimaksudkan untuk menguasai masyarakat bawah, dengan demikian ketika jaringan bawah sudah terbentuk masif, akan dengan sendirinya negara Islam berdiri. Sedangkan Ikhwanul Muslimin dan ISIS diklasifikasikan sebagai gerakan revolusioner yang arah gerakannya lebih kongkrit, yaitu dengan menduduki institusi-institusi negara, sehingga dengan penguasaan tersebut Islamisasi secara mutlak akan lebih mudah. Sederhananya ketika tiga gerakan ini bekerjasama membentuk kesatuan tunggal, Wahabi menyediakan massa arus bawah, sedangkan Ikhwanul Muslimin menyediakan lahan partai politik sebagai alat legitimasi untuk masuk secara institusional dalam peme-rintahan, sementara ISIS memiliki militansi dan amunisi yang lebih radikal. Sehingga ketika arus bawah sudah dikuasai, parlemen dan pos-pos pemerintahan sudah diduduki, maka upaya untuk mendirikan negara Islam bukanlah hal yang tidak mungkin.

Inilah yang kini menjadi masalah di mana-mana, khususnya di semenanjung Arab. Hal ini terjadi atas dasar komplikasi akut antara Wahabi, Ikhwanul Muslimin dan ISIS, sebagaimana yang terjadi pada luluh lantahnya Iraq, konflik berkepanjangan di Syiria, krisis politik dan kemanusiaan di Libya, kerusuhan dan kudeta di Tunisia. Fenomena konflik yang terjadi di negara-negara Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari campur tangan gerakan radikal.

Sehingga akan menjadi masalah ketika gerakan-gerakan itu diadopsi baik untuk kontestasi politik, atau penyelesaian masalah sosial di Indonesia. Letak masalahnya bukan pada nilai-nilai universal Islam, tapi pada pengkerdilan Islam atas nama politik dan kekuasaan. Dapat dibayangkan Timur Tengah dengan etnis tunggal dan mayoritas beragama Islam, yang hanya berbeda batas teritorial negara dapat hancur lebur oleh konflik berkepanjangan. Sedangkan Indonesia yang multietnis, budaya, dan agama ingin direduksi sehingga berseragam tunggal. Betapa dahsyatnya konflik dan kehancuran yang akan terjadi jika gerakan mereka berkembang di Indonesia.❖

Agenda Hizbut Tahrir Melawan Negara-Bangsa

Hizbut Tahrir, yang berarti Partai Pembebasan dalam Bahasa Arab, didirikan pada 1953 oleh Taqiyuddin al-Nabhani, seorang hakim pengadilan di Palestina.

Hizbut Tahrir yang kini tersebar di 45 negara mengklaim gerakannya menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia dan bertujuan untuk menegakkan kekhalifahan Islam atau negara Islam.

Menurut Zuhairi Misrawi dalam kolomnya di *detik.com*, di negara Yorda-nia yang merupakan basis utama gerak-an ini, sejak pertama kali mendaftar pada 1952 sebagai partai politik, Hizbut Tahrir langsung ditolak oleh pemerintah Yordania. Saat itu Hizbut Tahrir tidak mendaftar sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, tetapi mendaftarkan diri sebagai partai politik.

Hizbut Tahrir langsung ditolak karena dianggap bertentangan dengan konstitusi Yordania. Salah satunya, Hizbut Tahrir menentang nasionalisme yang sudah menjadi *common platform* seluruh warga negara. Di samping itu, Hizbut Tahrir menentang sistem dinasti yang sudah mapan. Ada beberapa hal lainnya yang dianggap dapat menerabas konstitusi yang sudah disepakati oleh berbagai faksi politik dan masyarakat.

Hizbut Tahrir dikabarkan mendapatkan celah untuk mengembangkan gerakannya di beberapa kawasan Palestina yang kekuasaannya berada di bawah otoritas Yordania, karena situasi objektif Palestina yang memberikan ruang bagi kelompok apapun untuk tumbuh. Pada mulanya Hizbut Tahrir hanya sebagai kelompok pengajian setelah Shalat Jum'at. Kemudian berkembang dan membuka cabang di beberapa daerah di Tepi Barat, terutama di kawasan pedalaman.

Gunakan Strategi Dakwah Kultural

Pada 1951, Taqiyuddin al-Nabhani mengikuti pemilu legislatif di Palestina. Tetapi ia kalah dari wakil Partai Ba'ast. Semua kandidat Hizbut Tahrir kalah, kecuali Ahmad Da'ur dari Tulkarem lolos ke parlemen setelah berkoalisi dengan Ikhwanul Muslimin.

Kekalahan tersebut menjadi titik-balik Hizbut Tahrir untuk meninggalkan gelanggang politik dan memilih jalur dakwah kultural. Mereka kembali menggariskan program untuk menguasai mimbar-mimbar masjid dan lembaga pendidikan keagamaan.

Selain itu, konflik internal yang terjadi di dalam Hizbut Tahrir menyebabkan eksistensi mereka di Palestina semakin tenggelam, yang menyebabkan beberapa pengurus terasnya mengundurkan diri, menyusul hijrahnya Taqiyuddin al-Nabhani ke Beirut. Pada 1956, beberapa aktivis Hizbut Tahrir diusir dari Yordania sehingga aktivitas mereka mati total pada saat itu.

Kondisi objektif yang terjadi di Yordania menjalar ke seantero negara di Timur-Tengah. Hampir tidak ada negara di Timur-Tengah yang kemudian memberikan ruang yang leluasa terhadap Hizbut Tahrir.

Ada dua alasan utama yang menjadi landasan kenapa Hizbut Tahrir dilarang di Timur-Tengah. Pertama, Hizbut Tahrir mempunyai ideologi khilafah, yang secara nyata bertentangan dengan realitas politik kontemporer. Di masa lalu, sebelum jatuhnya Dinasti Ottoman di Turki pada 1923, khilafah masih menjadi sistem politik. Tetapi setelah itu, dunia Islam khususnya Timur-Tengah mengalami trauma politik yang sangat akut perihal kembalinya sistem khilafah.

Kedua, Hizbut Tahrir ditengarai terlibat dalam beberapa kudeta di Timur-Tengah. Menurut Musa Kaylani (2014), pada dekade 60-an aktivis Hizbut Tahrir terlibat dalam kudeta di Yordania dan dekade 70-an di Tunisia. Pada 1974 juga para aktivis Hizbut Tahrir terlibat dalam kudeta di Mesir.

Dua alasan menonjol tersebut telah menyebabkan Hizbut Tahrir mempunyai posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka tidak mudah mengepakkan sayapnya, karena adanya benturan yang sangat serius dengan realitas politik di Timur-Tengah. Apalagi negara-negara Teluk yang mempunyai sistem monarki, yang secara diametral akan bertabrakan dengan sistem khilafah yang diusung Hizbut Tahrir.

Maka dari itu, pengalaman di Yordania telah menyadarkan para aktivis Hizbut Tahrir untuk mengambil langkah strategis yang jauh lebih jitu dengan cara bergerak di bawah tanah. Mereka memaksimalkan penyadaran personal, berinteraksi secara luas dengan banyak kalangan, serta mempengaruhi para tokoh politik dengan gagasan khilafah.

Hizbut Tahrir Dilarang di Beberapa Negara

Kendati begitu, negara-negara Timur-Tengah seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, Turki telah melarang Hizbut Tahrir. Sementara Uni Emirat Arab (UEA), Lebanon dan Yaman masih melanggengkan keberadaan kelompok tersebut.

Mesir membubarkan Hizbut Tahrir pada tahun 1974 lantaran diduga terlibat upaya kudeta dan penculikan mantan atase Mesir. Di Suriah, organisasi ini dilarang lewat jalur ekstra-yudisial pada 1998.

Sementara Turki secara resmi melarang Hizbut Tahrir, namun masih tetap beroperasi hingga kini. Pada tahun 2009 polisi di Turki menahan sekitar 200 orang karena diduga menjadi anggota tersebut.

Di belahan dunia yang lain, Rusia dan Jerman juga melarang eksistensi organisasi ini. Di Rusia, Mahkamah Agung memasukkan Hizbut Tahrir dalam 15 organisasi teroris pada 2003. Konsekuensinya, Hizbut Tahrir dilarang melakukan kegiatan apapun di Rusia.

Ketua DPP HTI Rahmat Kurnia saat menyampaikan orasi soal khilafah di depan anggota HTI

Hizbut Tahrir ditengarai terlibat dalam beberapa kudeta di Timur-Tengah. Menurut Musa Kaylani (2014), pada dekade 60-an aktivis Hizbut Tahrir terlibat dalam kudeta di Yordania dan dekade 70-an di Tunisia.

Di tahun yang sama, Menteri Dalam Negeri Jerman, Otto Schilly, melarang seluruh aktivitas Hizbut Tahrir di Jerman lantaran dituduh menyebarkan propaganda kekerasan dan anti semit terhadap Yahudi. Pemerintah Jerman kemudian membekukan seluruh izin atas aset mereka, serta memidanakan mereka yang melanggar aturan tersebut.

Sementara di Inggris, upaya untuk membubarkan organisasi dilakukan oleh dua perdana menterinya, Tony Blair dan David Cameron, namun terus mengalami kegagalan.

Padahal, sebelum menjabat Perdana Menteri periode 2010 - 2016 dalam kampanyenya Cameron dengan tegas berjanji untuk membubarkan kelompok tersebut. Upaya ini urung dilakukan ketika menjabat lantaran saran dari pengamat hukum yang mengatakan apabila pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir, organisasi tersebut akan mengajukan banding dan pemerintah akan kalah.

Di Spanyol dan Prancis, Hizbut Tahrir diawasi ketat karena dianggap ilegal.

Perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an saat pimpinan pesantren Al-Gazhali, Bogor KH. Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al-Baghdadiy. Abdullah tertarik dengan ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan hegemoni penjajahan dunia.

Abdullah yang merupakan tokoh ulama asal Cianjur itu lalu mengajak Abdurrahman ke Indonesia untuk berdakwah bersama. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkembang melalui dakwah di kampus-kampus besar, lalu meluas ke masyarakat dan masjid-masjid di perumahan hingga perusahaan.

Dalam perkembangannya, pada Muktamar Khilafah 2013 di Gelora Bung Karno, Jakarta, salah satu petinggi HTI, Rahmat Kurnia mengungkapkan ada empat pilar arah perubahan yang menjadi cita-cita HTI.

Pertama, ubah prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) menjadi kedaulatan di tangan Allah. Tinggalkan seluruh hukum jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja.

Kedua, ubah kekuasaan yang saat ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan umat.

Ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat.

Keempat, jadikan hak *tabanni* berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Berikan kewenangan pada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat, di antara pendapat para mustahid, yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam.

Pemerintah membubarkan ormas HTI karena dianggap bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila.

Menurut Menkopolhukam Wiranto, HTI sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri berdasarkan ideologi negara.

Sebelum Indonesia, negara terakhir yang melarang eksistensi Hizbut Tahrir adalah Malaysia, tiga tahun lalu. Pada 17 September 2015, Pemerintah negeri jiran menyatakan organisasi ini sebagai 'kelompok menyimpang' dan menegaskan siapa pun yang mengikuti gerakan pro-khilafah ini akan menghadapi hukum.❖

Khawarij: Awal Radikalisme Atas Nama Islam

Ilustrasi Ibnu Muljam Membunuh Sayidina Ali

Radikalisme merupakan tindakan yang mengharapkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik drastis dengan jalan kekerasan. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasarudin Umar dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa radikalisme sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total dan menggantinya dengan hal baru. Biasanya tindakan tersebut bersifat revolusioner. Menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Hal itu dinilainya sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Sementara itu, menurut Rahimi Sabirin dalam bukunya **Islam dan Radikalisme** (5:2004) menguraikan radikalisme adalah pemikiran atau sikap keagamaan yang ditandai: 1) sikap intoleransi, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, 2) sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, 3) sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan umat kebanyakan, dan 4) sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun radikalisme terdiri dari dua wujud yaitu radikalisme dalam pikiran (fundamentalisme) dan radikalisme dalam tindakan (terorisme).

Tindakan radikalisme bisa muncul dengan berbagai sebab dan latar belakang, bisa atas nama perbedaan politik, bisa atas nama kesukuan dan bisa juga atas nama agama. Radikalisme atas nama agama dianggap paling berbahaya dibandingkan dengan yang lainnya, karena menyeret dalil-dalil agama untuk membenarkan tindakannya. Diantara contoh radikali-sme agama antara lain, dalam agama Hindu ada kelompok radikal Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), yang menyerang pertemuan ibadah Minggu di Karnataka, India pada 3 Maret 2012. Pada 2014, mereka melakukan pemaksaan kepada ratusan penganut Kristen dan Islam di Agra untuk pindah ke agama Hindu. Juga kelompok kristen radikal Amerika Serikat Timothy Veigh, teroris pelaku pengeboman Oklahoma City pada 19 April 1995, bom yang terdiri dari 2300 kilogram bahan peledak, menewaskan 168 orang.

Bentuk-bentuk tindakan radikalisme tersebut merupakan ancaman yang berbahaya dan nyata bagi keberlangsungan hidup manusia. Lalu bagaimana asal mula radikalisme atas nama Islam? Bukankan Islam adalah agama damai dan mengajarkan perdamaian. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah telah memberi peringatan dengan menyatakan bahwa tindakan demikian (radikalisme) akan terus ada hingga kelak. Secara eksplisit pernyataan itu tertuang dalam beberapa dalam hadis yang menceritakan tentang Dzul Khuwaishirah (HR Bukhari 3341, HR Muslim 1773) dan hadis yang menceritakan mengenai ciri-ciri kelompok radikal (HR Bukhari nomor 7123, Juz 6 halaman 20748; Sunan an-Nasai bab Man Syahara Saifahu 12/ 474 nomor 4034; Musnad Ahmad bab Hadits Abi Barzakh al-Aslami 40/ 266 nomor 18947).

Asal Mula

Dalam perjalanan sejarah Islam, radikalisme dan penggunaan kekerasan untuk kepentingan politik golongan, dapat dirunut akarnya sesudah wafatnya Rasulullah SAW, terutama dengan munculnya apa yg dikenal sebagai kelompok (*firqah*) *Khawarij*. Peristiwa terbunuhnya Sayidina Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Peristiwa itu diungkap secara gamblang dan jelas dalam kitab *Al Bidayah Wan Nihayah* karya Ibnu Katsir. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Jarir dan pakar-pakar sejarah lainnya, menyebutkan jika peristiwa itu bermula dari berkumpulnya tiga orang *Khawarij*, mereka adalah Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam al-Himyari al-Kindi sekutu Bani Jabalah dari suku Kindah al-Mishri, al-Burak bin Abdillah at-Tamimi dan Amru bin Bakr at-Tamimi sambil membicarakan teman-temannya yang terbunuh oleh Sayidina Ali di perang Nahrawan. Peristiwa itu begitu membekas dalam hati mereka, sehingga kemudian bersepakat untuk melakukan balas dendam dengan merancang pembunuhan terhadap tiga orang yang mereka anggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pembunuhan ini mereka anggap sebagai tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Mereka lalu melakukan pembagian tugas, Ibnu Muljam menyanggupi untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Al-Burak bin Abdillah membunuh Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Amru bertugas membunuh Amru bin al-Ash. Dalam petemuan itu disepakati aksinya akan dilancarkan pada tanggal 17 Ramadhan tahun 40 H. Kemudian ketiganya berangkat menuju tempat target masing-masing.

Sejarah mencatat, sebenarnya Ibnu Muljam dikenal sebagai Al-Muqri yaitu orang yang sangat bagus bacaan Qur'annya, hafidz Al-Qur'an, taat dalam beribadah, shalat dan ahli puasa (termasuk puasa Daud). Tapi sayang bacaannya tidak masuk kecuali sebatas sampai batas kerongkongannya. Ini sesuai dengan peringatan Rasulullah bahwa akan ada orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi yakni orang-orang yang beribadah tetapi tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dari kelompok orang ini (orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim Al Najdi), akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al-Qur`an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala; mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum 'Ad." (HR. Muslim 1762)

Dikisahkan Ibnu Muljam berangkat ke Kufah dengan menyembunyikan identitas, hingga bertemu teman-temannya dari kalangan *Khawarij* yang dahulu bersamanya. Setetalah beberapa waktu berkumpul dengan teman-temannya, Ia kemudian bertemu dengan wanita bernama Qatham binti Asy-Syijnah yang terkenal memiliki paras cantik. Ibnu Muljam pun jatuh hati dan melamarnya. Qatham, yang ayah dan kakaknya terbunuh dalam perang Nahrawan langsung menerima dengan tiga syarat yaitu mahar tiga ribu dirham, seorang *khadim* (budak wanita) dan membunuh Sayidina Ali untuk dirinya. Cerita ini dipertegas juga oleh Ibnu A'tsam al-Kufi yang menyebutkan bahwa kecintaan Ibnu Muljam kepada Qatham adalah alasan untuk membunuh Amirul Mukminin.

Setelah Ibnu Muljam dapat menikahi Qatham, ia kemudian diminta untuk segera melaksanakan janjinya yaitu membunuh Sayidina Ali. Dalam rencana itu Qatham mengutus seorang lelaki bernama Wardan, dari Taim Ar-Ribab, untuk menyertai dan melindungi Muljam. Muljam sendiri lalu mengajak Syabib bin Bajrah al-Asyja'i al-Haruri dalam misinya. Ketika membujuk Syabib, Muljam menjanjikan kemuliaan dunia dan akhirat, sambil memanas-manasi dengan mengingatkan peristiwa perang Nahrawan dimana teman-temannya terbunuh. Mendengar bujukan yang demikian, akhirnya Syabib tertarik dan ikut serta dalam misi pembunuhan terhadap Sayidina Ali.

Mulailah Ibnu Muljam, Wardan dan Syabib bergerak dan menghunus pedang masing- masing. Mereka mencari posisi dan kemudian duduk di hadapan pintu yang biasa dapakai Sayidina Ali untuk keluar. Ketika Sayidina Ali keluar dan mengambil wudhu, hendak menghadap Allah SWT. Tiba-tiba sebilah pedang yang telah dilumuri racun diayunkan kepadanya. Dengan cepat Syabib menyerang dengan pedangnya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. Kemudian Ibnu Muljam menebaskan pedangnya ke atas kepala beliau. Darah mengucur membasahi jenggot beliau dengan luka menganga. Ibnu Muljam, berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali!"

Setelah itu ia membaca firman Allah: *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambaNya."* (Al-Baqarah: 207).

Lantas Sayidina Ali berteriak, "Tangkap mereka!"

Adapun Wardan melarikan diri namun berhasil dikejar oleh seorang lelaki dari Hadhramaut lalu membunuhnya. Adapun Syabib, berhasil menyelamatkan diri dan selamat dari kejaran manusia. Sementara Ibnu Muljam berhasil ditangkap.

Sayidina Ali menyuruh Ja'dah bin Hubairah bin Abi Wahab untuk mengimami Shalat Fajar. Sayidina Ali pun dibopong ke rumahnya. Lalu digiring pula Ibnu Muljam kepada beliau dan dibawa kehadapan beliau dalam keadaan dibelenggu tangannya ke belakang pundak. Kemudian beliau berkata, "Jika aku mati maka bunuhlah orang ini, dan jika aku selamat maka aku lebih tahu bagaimana aku harus memperlakukan orang ini!" Selang beberapa hari Sayidina Ali wafat dan Ibnu Muljam pun dieksekusi mati.

Waspada Ibnu Muljam Modern

Sejarah Ibnu Muljam di atas harus menjadi pelajaran dan membuka pikiran kita kalau siapapun bisa terjerumus pada radikalisme termasuk orang yang rajin ibadahnya. Bahkan orang-orang demikian itu mendasarkan tindakannya mengatasnamakan agama.

Ideologi Ibnu Muljam adalah ideologi yang menganggap orang yang tidak sepemikiran dengannya sebagai kafir. Orang yang berbeda dengannya adalah sesat dan wajib dibinasakan. Ideologi yang demikian sangatlah berbahaya bagi perkembangan peradaban.

Umat Islam perlu selalu waspada jangan sampai ideologi ini berkembang dan muncul generasi *neo-khawarij* yang berbekal pemahaman agama tekstual dan tampilan yang *syari'*, namun dengan mudah membid'ahkan atau mengkafirkan orang-orang di luar dirinya. Kita wajib melawan pemahaman dan Ideologi Ibnu Muljam itu dengan kasih sayang, sebagaimana yang selalu dicontohkan Nabi. Seandainya Nabi mendakwah-kan agama dengan keras (marah-marah) maka niscaya semua umat akan kabur dan menjauhi Islam.❖

Pembunuh Khalifah Ali, Ibnu Muljam dikenal sebagai Al-Muqri yaitu orang yang sangat bagus bacaan Qur'annya, hafidz Al-Qur'an, taat dalam beribadah, shalat dan ahli puasa (termasuk puasa Daud).

HOAX
GANGGU STABILITAS DAN KEAMANAN BANGSA

KH. Ma'ruf Amin

Media sosial semestinya dimanfaatkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten positif. Sayangnya, beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif, apa lagi menghadapi tahun pemilu, media sosial banyak digunakan oleh para pengguna untuk bersiasat penyebaran isu. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat.

Menyadari hal tersebut, sudah banyak kelompok yang secara proaktif mengajak masyarakat agar lebih cerdas menggunakan media sosial. Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi penyebaran *hoax* atau berita palsu dengan cara menyusun undang-undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif.

Tercatat dari tahun 2015 hingga 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memblokir 800.000 situs yang berkonten negatif, termasuk yang berisi *hoax*. Kemenkominfo juga terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital guna mencegah bahaya *hoax*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatur ketentuan umum mengenai panduan menggunakan media sosial yang diharamkan bagi Umat Islam, terutama penyebaran berita *hoax*.

Hal tersebut tercantum dalam Fatwa MUI 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, yang memiliki pokok hukum bahwa setiap muslim

MUI sudah keluarkan fatwa mengenai *hoax* untuk memberikan hukuman secara moral. Namun penegak hukum juga perlu melakukan langkah untuk menjerat pelaku *hoax*.

yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

1. Melakukan *Ghibah, Fitnah, Namimah*, dan Penyebaran permusuhan.
2. Aksi *Bullying*, ujaran kebencian serta permusuhan atas dasar SARA
3. Menyebar *Hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik.
4. Menyebar materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang dilarang secara syar'i.
5. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan / atau waktunya.
6. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat diaksesnya konten maupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat.
7. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.

KH. Ma'ruf Amin menyebut penyebaran berita bohong atau *hoax* sudah marak sebelum Pemilu 2019. Oleh sebab itu, hoax harus ditangani dengan serius.

"Saya kira memang sebelum pilpres *hoax* sudah banyak beredar, karena itu kita menanggapi dengan sangat serius," ujar Ma'ruf Amin di Hotel Nabasa Balige, Balige, Sumatera Utara, Sabtu (6/10).

Ketua Umum MUI tersebut mengaku sudah ada fatwa mengenai *hoax* untuk memberikan hukuman secara moral. Namun penegak hukum juga perlu melakukan langkah untuk menjerat pelaku *hoax*.

"Secara moral kita sudah keluarkan fatwa (*hoax*). Tapi moral itu tidak cukup. Karena itu, perlu ada langkah-langkah menjerakan. Saya kira perlu ada tindakan yang lebih mengarahkan hukuman penjara," jelas dia.

Menurut dia, penyebaran *hoax* bisa mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Indonesia. Oleh sebab itu, penegak hukum perlu menangani masalah *hoax*.

"Kalau (pelaku) tidak jera, bisa mengganggu stabilitas keamanan dan mengganggu keutuhan bangsa. Dengan *hoax*, orang seenaknya membuat gaduh. Karena itu, saya berharap serahkan kepada pihak berwenang untuk menangani masalah *hoax* itu," ucap dia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berbagi tips menangkal berita bohong atau *hoax* kepada ribuan penyuluh agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 28 Maret 2018. Dalam dialog yang digelar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta itu, Lukman mendapat pertanyaan dari seorang penyuluh bagaimana kiat terbebas dari *hoax*.

"Karena saat penyuluh berbicara pada warga, mungkin yang didengarkan materinya hanya 20 persen, sisanya (warga) memilih informasi dari media sosial," ujar Nurdiana, seorang penyuluh agama.

Lukman menuturkan, setiap informasi berpotensi mengandung sebagian kebenaran dan kesalahan. Oleh sebab itu penting bagi penerima berita atau informasi melakukan klarifikasi, konfirmasi atau sikap tabayyun. "Kita punya kemampuan analitik sendiri ketika menerima postingan berita dari pihak lain, apakah informasi itu punya dasar-dasar yang bisa diyakini kebenarannya," ujarnya.

Mulai dari berita yang diinformasikan itu berisi apa, asalnya dari mana, siapa pembuatnya, untuk tujuan apa berita itu dibuat dan paling penting apa manfaatnya berita itu. "Kita harus memulai dari sendiri bertanya, berita itu manfaatnya apa," ujar Lukman.

Lukman Hakim Saifuddin

Secara moral kita sudah keluarkan fatwa (*hoax*). Tapi moral itu tidak cukup. Karena itu, perlu ada langkah-langkah menjerakan. Saya kira perlu ada tindakan yang lebih mengarahkan hukuman penjara.

Jika masih merasa belum yakin atas kebenaran berita atau informasi itu, menurut Lukman, pihak pertama yang harus dimintai klarifikasi adalah pengirim berita itu. "Yang jadi masalah sekarang, orang itu seringkali meminta klarifikasi dari orang yang sama–sama tidak tahu kebenarannya," ujarnya.

Alih-alih mendapat kejelasan, berita *hoax* yang diklarifikasi itu justru makin menyebar karena keluguan, kepolosan, dan keterbatasan wawasan para penerimanya. "Jadi kembalikan berita atau informasi tak jelas itu pada pengirim anda untuk menjelaskan, kalau ragu, ya, jangan disebarkan ke lainnya sehingga malah menyebar kebingungan," ujarnya.

Lukman menuturkan, maraknya sebaran berita atau informasi tak jelas saat ini tak bisa dilepaskan dari masalah karena rendahnya literasi bermedia sosial. "Kita ini tiba-tiba punya smartphone, tapi tak pernah diajari bagaimana bersosial media, ya di sekolah atau lembaga kursus, sehingga tak bisa menganalisis berita atau informasi," ujarnya.

Lukman pun meminta para penyuluh agama menjadi orang-orang yang ikut terjebak dalam sebaran berita bohong. "Jadilah penerang untuk masyarakat dengan turut menangkal berita atau informasi tak jelas," pungkas Lukman.❖

Obor Rakyat, Asal Usul Fitnah Jokowi PKI & Antek Asing

Mengambil Hikmah Penyebar Hoax yang Berakhir di Penjara

Tabloid Obor Rakyat, Media yang menyebar fitnahdan hoax tentang Jokowi

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu sebuah tabloid bernama 'Obor Rakyat' disebarkan ke pondok pesantren dan masjid-masjid di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Edisi pertama tabloid tersebut terbit bulan Mei 2014. Kala itu, mengangkat judul 'Capres Boneka' dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Okezone.com menyebutkan tabloid tersebut membuat tulisan yang dari judulnya saja tampak menghina Jokowi.

Judul itu diantaranya Capres Boneka, Jokowi Anak Tionghoa, Putra Cina asal Solo, Ayah Jokowi adalah Oey Hong Liong, Status Perkawinan ibunda Jokowi dengan Pey Hong Liong?, Dalam Tradisi Cina Kaya, Cukong-Cukong di Belakang Jokowi, Dari Solo Sampai Jakarta De Islamisasi Ala Jokowi, Jokowi Guru Selamat yang Gagal, Sang Pendusta Mau Dibohongi Lagi, Capres Boneka Suka Ingkar Janji, Disandera Cukong dan Misionaris, serta Partai Salib Pendukung Jokowi.

Sebulan kemudian, pada 4 Juni 2014 Tim pemenangan capres dan cawapres Jokowi-JK melaporkan tabloid itu ke Bawaslu. Namun, Obor Rakyat tetap membuat edisi kedua dan beredar dengan judul '1001 Topeng Jokowi'.

Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menangkap Pemimpin Redaksi Obor Rakyat, Setyardi Budiono dan Redaktur Pelaksana Darmawan Sepriyosa, Selasa (8/5/2018) di dua tempat yang berbeda di Jakarta. Setyardi diamankan di daerah Gambir sedangkan Darmawan ditangkap di daerah Tebet Timur.

"Kami telah mengamankan yang bersangkutan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan telah melaksanakan hak nya dalam melakukan upaya hukum baik melalui Banding dan Kasasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mohammad Rum di Jakarta, Selasa (8/5) malam seperti dilansir *tirto.id.*

Selanjutnya, kedua terpidana dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk menjalani hukuman. Setyardi dan Darmawan dijatuhi pidana delapan bulan penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti melakukan penistaan dengan tulisan terhadap Jokowi pada Pilpres 2014 melalui tabloid tersbut.

Fitnah Jokowi PKI Berawal dari Obor Rakyat

Isu Partai Komunis Indonesia (PKI) sepertinya masih melekat pada Presiden Jokowi. Isu tersebut kemudian cukup mengganggu Jokowi, sehingga berkali-kali dia menepis isu tersebut dalam berbagai forum-forum publik. Bahkan, Jokowi sempat melontarkan kata-kata 'tabok' penyebar isu *hoax* Jokowi PKI.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Shadzily menjelaskan, hal tersebut dilakukan Jokowi karena masih banyak masyarakat yang percaya bahwa Jokowi simpatisan PKI, terutama di Jawa Barat.

"Data internal kami, 6 persen masyarakat masih percaya Pak Jokowi itu PKI. Itu yang harus dibantah Pak Jokowi di berbagai forum dan pertemuan," ujar Ace Hasan dilansir Tempo, Jakarta pada Senin, 12 November 2018.

Berkali-kali, Jokowi membantah bahwa dirinya sama sekali tidak ada sangkut-paut dengan PKI.

"Saya ini lahir tahun 1961. PKI itu ada tahun 1965. Saya berusia empat tahun ketika itu. Masak ada anggota PKI balita? ini kan nggak bener," kata Jokowi dalam berbagai forum.

Isu Jokowi PKI telah berembus sejak ia maju pada Pemilihan Presiden 2014 yang diproduksi melalui tabloid 'Obor Rakyat'. Meski tidak memiliki dasar, isu tersebut selalu dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya.❖

Redaktur Obor Rakyat menjadi tersangka

Penyebar Hoax Lebih Berbahaya dari Orang Sakit Jiwa

Komjen Pol Ari Dono Sukmanto

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menyebut penyebar berita palsu (hoax) lebih berbahaya jika dibandingkan dengan orang sakit jiwa, bahkan penyakit penyebaran berita palsu itu juga dapat menular ke orang lain.

Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan oknum penyebar berita palsu dinilai berbahaya, karena seringkali mengaitkan isu sensitif pada berita yang disebarkannya seperti isu suku, agama, ras, dan golongan (SARA) untuk menularkan-nya pada orang lain.

Menurutnya, penyebar berita palsu itu terkadang juga dianggap sebagai pahlawan oleh orang lain yang sudah ditularkan.

"Makanya, ini kan aneh. Apa namanya kalau bukan sakit jiwa karena suka menggoreng isu hoax, lalu gorengan itu dimakan. Kemudian yang makan jadi ikutan menyebarkan isu hoax," tutur Ari, Jum'at (23/2/2018).

Dia menjelaskan Bareskrim Mabes Polri juga kembali menangkap pelaku penyebar berita palsu belum lama ini di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berinisial MKN (57). Menurutnya, pelaku telah memposting isu SARA yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi di media sosial.

"Sebutan apa yang paling tepat bagi lelaki yang berani menghina seorang wanita yaitu Ibu Negara, kalau dia lahirnya bukan dari seorang ibu, ya tidak apa-apa," kata Ari.

Ari juga mengimbau masyarakat agar tidak termakan berita palsu yang disebarkan oleh oknum tertentu di media sosial. Menurutnya, polisi akan mengambil sikap tegas terhadap para pelaku penyebar berita palsu tersebut.

Tersangka MKN merupakan pelaku penyebar berita palsu ke-13 yang telah diringkus oleh kepolisian sepanjang Februari 2018. Pada Januari 2018, pelaku penyebar berita palsu yang diamankan oleh Bareskrim Polri ada sekitar 6 orang, artinya penyebar berita palsu meningkat dua kali lipat hanya dalam periode Januari-Februari 2018 dengan total pelaku yang telah ditangkap selama periode itu adalah 19 pelaku.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak termakan oleh isu hoax, seperti itu lagi ke depannya. Kami akan mengambil sikap tegas jika ada yang menyebarkan berita palsu," ujarnya.❖

Bank Wakaf Mikro

Atasi Kesenjangan dan Kemiskinan

Halaqoh Mingguan Akbar di Bank Wakaf Mikro (BWM) KHAS Kempek

Kemiskinan dan ketimpangan telah berlangsung lama, Bedasarkan data BPS pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%. Mengatasi permasalahan itu perlu peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, diantaranya adalah melalui program pemberdayaan ekonomi umat.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia melihat potensi 28.194 pesantren (data Kementerian Agama RI) bisa berperan untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Khususnya di masyarakat sekitar pesanten.

Ahmad Soekro, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK mengatakan Bank Wakaf Mikro ini dimaksudkan untuk memperluas akses keuangan masyarakat di tingkat mikro. "Bank Wakaf Mikro ini akan berfokus pada pembiayaan mikro masyarakat kecil," ujar Soekro seperti dilansir *kontan.com.*

Ahmad Soekro menjelaskan lebih lanjut, Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dana yang digunakan adalah murni dana donasi. Nantinya OJK akan bekerja sama dengan pesantren atau sekolah Islam untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro guna menyalurkan pembiayaan di lingkungan pesantren.

OJK akan menerapkan sistem jemput bola dan menawarkan kepada pesantren yang ada di seluruh Indonesia yang berkompeten untuk menjadi Bank Wakaf Mikro. Selain itu OJK juga akan menerima apabila ada pesantren yang berinisiatif untuk ikut serta. Tentunya akan dilihat potensi masyarakat sekitar apakah memerlukan pembiayaan di segmen mikro serta akan menyasar kepada masyarakat kecil yang produktif.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini pemerintah sudah mendirikan Bank Wakaf Mikro di 33 pondok pesantren. Setiap Bank Wakaf Mikro, menurut Presiden, mendapat modal sekitar Rp.8 miliar.

Jokowi menyampaikan kabar ini saat meresmikan acara Peluncuran Program Bank Wakaf Mikro, di Pondok Pesantren (Ponpes) Mawaridussalam, di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Senin (8/10/2018).

Pendirian Bank Wakaf Mikro ini menurut Jokowi sebagai respons pemerintah atas keluhan dari masyarakat di desa-desa atau di pondok-pondok pesantren mengenai sulitnya mengakses pelayanan perbankan.

"Nanti ibu-ibu yang mau pinjam atau yang sudah pinjam, pertama itu Rp3 juta. Nanti kalau sudah mengangsur baik, bisa kembangkan lagi Rp 1-3 juta. Kemudian kalau sudah diangsur, bagus, mau nambah Rp10 (juta) silakan, mau nambah Rp15 (juta) silakan, kan enggak ada agunan," ujar Jokowi, seperti dikutip *Tribunnews.com* dari laman Setkab.

Menurut Jokowi, pengembangan ekonomi mikro, pengembangan ekonomi umat, terutama di pondok pesantren dan di lingkungan pondoknya harus berjalan dengan baik.

Karena itu, Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus mengembangkan Bank Wakaf Mikro.

"Kita harapkan nantinya kalau sudah gede, sudah ratusan atau sudah ribuan, ini akan diholdingkan menjadi sebuah bank besar," kata Presiden Jokowi. ❖

> **"OJK akan menerapkan sistem jemput bola dan menawarkan kepada pesantren yang ada di seluruh Indonesia yang berkompeten untuk menjadi Bank Wakaf Mikro**
>
> ***Ahmad Soekro***

4 Tahun Jokowi-JK: Era Baru Ekonomi Indonesia?

Empat tahun sudah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Apa yang sudah dicapai keduanya di bidang ekonomi? Staf khusus Presiden di bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, setidaknya secara umum ada lima hal yang bisa diperhatikan dalam pencapaian Jokowi-JK di empat tahun ini. Pertama, pencapaian makro ekonomi nasional. Kedua, keadilan ekonomi dan sosial. Ketiga, kemandirian ekonomi. Keempat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kelima, pengelola pembangunan, terutama dari sisi fiskalnya.

Dari kelima itu, Erani lebih menyoroti hal yang belum banyak disinggung, yakni Indonesia dalam empat tahun terakhir ini masuk dalam zona stabilisasi harga yang standarnya itu sudah seperti negara maju. "Ini seperti era baru ekonomi Indonesia,"

ungkap Erani belum lama ini. Lebih lanjut ia merinci, hal itu ditopang dari inflasi yang bisa dipertahankan di bawah 4 persen. Layaknya negara di Eropa, inflasi tidak pernah nyaris di atas 5 persen. Ia berpendapat, angka inflasi merupakan wujud berhasilnya pemerintahan Jokowi dalam menghadapi harga pangan dan membangun rantai pasok yang efisien. Dengan inflasi yang rendah, maka masyarakat diuntungkan karena pendapatannya tidak akan tergerus dengan harga yang meningkat.

Bahkan dari sisi produsen pun, di tengah inflasi yang rendah ini, masih bisa berekspansi. Sebab, pemerintah memberikan berbagai insentif. "Sehingga baik produsen dan masyarakat dua-duanya bahagia," kata Erani. Jelas, tambahnya, keadaan saat ini jauh berbeda di empat tahun sebelumnya yang angka inflasinya bisa mencapai 8 persen. "Tanpa kita sadari, kita menuju pada situasi di mana negara ini berhasil menata ekonominya," tutur Erani. Sejatinya, inflasi merupakan indikator penting hampir semua negara. Pasalnya, jika inflasi rendah, maka tingkat suku bunga juga bisa rendah. Sehingga bisa mengerek investasi. "Kalau investasi naik maka potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa tercapai," ujar dia.

Pemerataan ekonomi Erani juga mencatat, pemerataan ekonomi juga sudah dilakukan pemerintah lewat pembangunan infrastruktur. Hal itu dilihat dari 223 proyek strategis nasional (PSN) yang terletak di seluruh Indonesia. Yakni sebanyak 53 proyek (Rp 545,8 triliun) di Sumatera, 89 proyek (Rp 995,9 triliun), Sulawesi 27 proyek (Rp 308,3 triliun), Kalimantan 17 proyek (Rp 481 triliun), Bali dan Nusa Tenggara 13 proyek (9,4 triliun), Maluku dan Papua 12 proyek (464 triliun), dan 12 proyek dan tiga program nasional (1.345,7 triliun). "Pemerintah semata-mata melakukan hal itu karena ingin menciptakan ekonomi yang adil," kata Erani. Bahkan dengan begitu, ia meyakini apa yang dilakukan pemerintah saat ini bisa menjadi warisan terbesar yang bisa dirasakan masyarakat dalam 25 tahun mendatang. ❖

Sumber: Kompas

Jokowi Targetkan Bangun 1000 BLK di Pondok Pesantren

> Saat ini Balai Latihan Kerja khusus di pondok pesantren baru 50. Tetapi tahun depan insyaallah akan kita perbanyak lagi jumlahnya, kurang lebih 1.000 yang akan saya dirikan di pondok-pondok pesantren.
>
> *Presiden Joko Widodo*

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji akan meningkatkan jumlah balai latihan kerja (BLK) di pondok pesantren. Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu menargetkan perkembangam BLK di lingkungan pondok pesantren bisa mencapai 1.000 pada tahun depan.

Menurut Jokowi, tahun ini beberapa program untuk pemberdayaan sumber daya manusia telah masuk di sejumlah pondok pesantren. Program itu di antaranya Bank Wakaf Mikro.

"Untuk program Bank Wakaf Mikro memang baru kita mulai. Saat ini ada 33 pondok pesantren yang sedang kita coba," kata Jokowi di hadapan puluhan ribu santri yang memadati Benteng Vastenburg Solo dalam rangka Apel Akbar Santri Nusantara, Sabtu malam, (20/10/2018) seperti dikutip *liputan6.com*

Selain Bank Wakaf Mikro, Jokowi juga menyebutkan sedang mencoba membuat BLK di sejumlah pondok pesantren. Bahkan, jumlah balai latihan kerja di pondok pesantren akan terus bertambah setiap tahun.

"Saat ini Balai Latihan Kerja khusus di pondok pesantren baru 50. Tetapi tahun depan insyaallah akan kita perbanyak lagi jumlahnya, kurang lebih 1.000 yang akan saya dirikan di pondok-pondok pesantren," harapnya.

Jokowi berjanji akan melipatgandakan jumlah balai latihan kerja khusus di pondok pesantren, karena jumlah pondok pesantren di Indonesia cukup banyak.

"Tahun depan insyaallah akan dilipatkgandakan lagi karena di negara kita ini punya 28 ribu pondok pesantren yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," papar Jokowi.

Jokowi berharap keberadaan BLK di pondok pesantren mampu mengembangkan potensi para santri. Bahkan, masing-masing BLK di pondok pesantren akan memiliki program yang berbeda dengan BLK di pondok pesantren lainnya.

"Setiap pondok pesantren memiliki perbedaan-perbedaan, misalnya BLK ada yang senang disiapkan program komputerisasi untuk belajar mengenai komputer. Ada yang coba berkaitan dengan pendidikan program garmen dan fashion," jelas dia.

Untuk rencana pengembangan program itu, Jokowi mengaku hampir setiap minggu mengunjungi berbagai pondok pesantren untuk mengetahui, program apa yang cocok diterapkan di BLK pondok pesantren tersebut. Dengan keberadaan balai latihan kerja ini, diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia para santri serta keterampilan para santri yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren. Selain itu, juga akan dilakukan evaluasi program latihan yang diterapkan di BLK pondok pesantren.❖

Pemerintah Luncurkan Beasiswa untuk Santri

Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan beasiswa santri yang ditujukan untuk peserta didik, pendidik, dan atau tenaga kependidikan di pondok pesantren yang aktif minimal selama tiga tahun dalam kegiatan pendidikan di lingkungan pesantren.

Nantinya, program beasiswa santri ini akan diberikan kepada 100 santri terpilih untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang S2 dan S3.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, usulan mengenai beasiswa santri ini sudah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal dirinya kembali menjabat posisi Menteri Keuangan di pertengahan tahun 2016.

"Saya senang sekali kita berhasil meluncurkan hasil keputusan yang dibuat waktu sidang kabinet, waktu kami kembali menjadi Menteri Keuangan," ujar dia dalam acara Peluncuran Beasiswa Santri di kawasan Kementerian Agama, Senin (12/11/2018).

Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, program beasiswa santri melalui LPDP ini merupakan afirmasi khusus yang ditujukan kepada ekosistem pondok pesantren.

Sehingga dirinya berharap, para santri dapat memanfaatkan beasiswa ini untuk mengembangkan institusi pondok pesantren, agar kelembagaan pondok pesantren menjadi semakin kuat. Selain itu, berbagai ilmu yang selama ini dikembangkan melalui pondok pesantren pun semakin berkualitas.

"Mereka yang selama ini mengelola pondok pesantren mengalami peningkatan wawasan keilmuan melalui program beasiswa ini. Jadi sekaligus, insititusinya dikembangkan dan keilmuannya pun berkembang," jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Adapun Sri Mulyani menambahkan, anggaran yang akan disalurkan untuk program beasiswa santri ini berasal dari dana abadi pendidikan tahun 2019 yang sudah ditambahkan sebesar Rp 20 triliun. "Anggaran LPDP 2019 kami dapat tambahan Rp 20 triliun untuk masuk di dana abadi, jadi dana yang digunakan untuk 100 santri sama. Tidak ada pos terpisah," jelas Sri Mulyani. ❖

Pengelolaan Masjid yang Baik Hindarkan Paham-paham Radikal

Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), KH. Rusli Effendi, S.Pdi, SE, M.Si memaparkan bagaimana cara pengelolaan masjid yang baik sehingga masjid bukan hanya sebatas tempat ritual ibadah saja tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu Rusli menjelaskan, pengelolaan masjid yang baik bukan saja akan memaksimalkan fungsi masjid, tetapi bisa menghindarkan masjid dari paham-paham radikal.

"Orang-orangnya (pengurus) harus mumpuni, dari bidang pendidikan agama, kemudian juga harus moderat, tidak dominan kepada salah satu paham saja, dalam artian bisa memahami paham-paham yang lain," ungkap KH. Rusli Effendi.

Selain itu, perbedaan mazhab, organisasi dan golongan tidak menjadikan perbedaan fungsi masjid, yakni selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pemberdayaan dan pemersatu ummat.

"Bahkan masjid itu sebetulnya sebagai pusat peradaban. Artinya, segala aspek kegiatan manusia berpusat di masjid, beribadah, melakukan kegiatan sosial, melakukan kegiatan pendidikan, memikirkan persoalan ekonomi, bahkan siasah (politik) dalam artian bukan politik praktis tapi sebagai pencerahan *fiqih siasah*," paparnya.

Itulah sebenarnya kesejatian umat Islam hari ini, kata dia, adalah mengembalikan peran masjid seperti yang dilakukan oleh Nabi dahulu. Memusatkan segala aspek pemberdayaan ummat di Masjid.

Lebih rinci Rusli memaparkan pemberdayaan masjid di tingkat pertama adalah *halaqoh* (pertemuan-pertemuan) berupa pengajian-pengajian *ta'lim*, kemudian diatasnya ada *tarbiyah* (pendidikan) yang sudah formal. Dan ada juga sebagai *hadlhoroh* (peradaban) yang artinya masjid difungsikan sebagai pusat pembinaan perekonomian.

"Pusat perekonomian, bukan berarti sebagai tempat berdagang, tetap bagaimana menggerakan infaq, menggerakan ekonomi syariah, mendorong masyarakat menumbuhkan perekonomian, Fungsi-fungsi totalitas ini disebut dengan peradaban." tambahnya.

Kriteria Masjid yang Baik

BPPMI ingin menjadikan masjid Istiqlal sebagai masjid percontohan yang bisa diadopsi oleh seluruh masjid yang ada di Indonesia, terutama masjid-masjid yang di lingkungan pemerintahan.

"Kita juga ingin, masjid-masjid di pedesaan bisa menerapkan managemen yang baik, dan masjid tidak hanya menjalankan ritual ibadah saja", jelas Rusli.

Dia menjelaskan, kriteria masjid yang baik itu dapat berfungsi dengan maksimal, selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat pendidikan, dakwah dan pemberdayaan umat.

"Bahkan saat ini masjid sebagai pusat wisata relijius," jelasnya.

Rusli mencontohkan, masjid Istiqlal dikunjungi tidak kurang dari 200 ribu perbulan wisatawan relijius baik dari domestik dan mancanegara, bahkan hampir tiap hari dikunjungi oleh tamu negara.

Masjid sebagai pusat pendidikan, Rusli mencontohkan Istiqlal memiliki lembaga pendidikan dari RA, Diniyah, Tsanawiyah hingga Aliyah.

"Bahkan sekarang sudah disiapkan perguruan tinggi," katanya.

Selain sebagai pelayanan ibadah, masjid juga memiliki fungsi management yang dikenal dengan *idaroh* (pengelolaan). Karena masjid harus harus memiliki perencanaan yang baik, perencanaan ibadah ataupun perencanaan dakwah.

Sehingga tidak boleh lagi masjid yang hanya menjalankan rutinitas. Akan tetapi segala kegiatan harus dilakukan dengan perencanaan yang terorganisasi.

> **"Kita juga ingin, masjid-masjid di pedesaan bisa menerapkan manajemen yang baik, dan masjid tidak hanya menjalankan ritual ibadah saja.**
>
> ***KH. Rusli Effendi***
> ***Sekjen BPP Masjid Istiqlal***

"Memang berbeda antara masjid milik negara, pemerintah dengan masjid masyarakat, baik secara organisasi, pengurusannya ataupun dari sisi program-program yang dibuat, dengan manajemen yang baik maka program-programnya akan terukur," jelasnya.

Menurut Rusli, pihaknya terus mengupayakan agar masjid-masjid di daerah bisa melakukan pengelolaan masjid dengan maksimal, diantaranya dengan cara melakukan silaturahmi dengan pengurus-pengurus masjid provinsi, kemudian kabupaten/kota hingga kemudian di tingkat desa. Dalam hal ini, Kementerian Agama juga berperan diantaranya dengan pembentukan Subdit Kemasjidan dan Bimas Islam. Langkah selanjutnya, pihaknya juga memperkenalkan masjid dengan teknologi yang akan mempermudah kerja pengelola terutama yang berkaitan dengan database. Ini kemudian bisa diterapkan di seluruh masjid kabupaten/kota.

"Misalnya, dalam proses mencari ustadz yang ahli fikih, itu sudah ada databasenya yang menyediakan, sehingga masjid-masjid di kota akan mudah mengakses dan mengundangnya. Manajemen seperti ini memang perlu waktu, tapi akan terus diupayakan," pungkasnya. ❖

Kurikulum Khutbah Jum'at Masjid Istiqlal Jakarta

BERIKUT ini adalah tema-tema Khutbah Jum'at di Masjid Istiqlal selama satu tahun sebagai contoh untuk bisa diterapkan di masjid-masjid lainnya.

1. Merenungi Hakikat Umur
2. Strategi Menggapai Hidup Mulia
3. Peran Kampus Islam Dalam Melahirkan Pemimpin Umat
4. Berdzikir Membuat Hidup Bahagia
5. Peran Ormas Islam Dalam Merawat NKRI
6. Peran Pendidikan Islam Dalam Merajut Kebangsaan
7. Pemuda dan Kebangkitan Islam
8. Peran Wakil Rakyat Dalam Bingkai Persatuan Umat
9. Thariqoh Sebagai Jalan Menuju Ridha Ilahi
10. Al-Qur'an Sebagai *Way Of Life*
11. Sikap Disiplin Kunci Kesuksesan
12. Keutamaan Istighfar
13. Membangun Umat Islam Yang Berkemajuan
14. Shalat Sebagai Wujud Kepatuhan dan Kesyukuran Hamba
15. Beramal Sosial Sesuai Tuntunan Al Qur'an
16. Ulama Dan Kerukunan Umat
17. Kebangkitan Umat Islam di Era Milenial
18. Sambut Ramadhan Dengan Suka Cita
19. Korupsi Meruntuhkan Bangsa
20. Memahami Ulama Sebagai Pewaris Nabi
21. Puasa Sebagai Detoksinasi Jiwa Dan Raga
22. Kiat Menjaga Istiqomah Dalam Amaliyah Ramadhan
23. Jiwa Suci di Hari Raya Fitri
24. Menjaga Hati Sebagai Nahkoda Kehidupan
25. *Ukhuwah Islamiyah* Kunci Kebangkitan Umat
26. Mewariskan Pendidikan Bermutu Menuai Generasi Unggul
27. Pendidikan Berbasis Akhlak
28. Hukum Yang Berkeadilan Untuk Semua
29. Membangun Masyarakat Madani Dari Keluarga Sakinah
30. Memperkuat *Ukhuwah Wathoniyah*
31. Al Qur'an Sumber Utama Hukum Islam
32. Hikmah Dan Keutamaan Ibadah Haji
33. Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa
34. Merindukan Ulama Yang Produktif Menulis Kitab
35. Ekonomi Syariah dan Kebangkitan Umat Islam
36. Persatuan Umat Untuk Kemaslahatan Bangsa
37. Pendidkan Islam Era Generasi Milenial
38. Peran Cendikiawan Muslim di Era Modern
39. Makmur Masjid, Makmur Umat
40. Merunut Sejarah Kebangkitan Umat Islam
41. Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat
42. Laki-laki Yang Hatinya Tertambat Kepada Masjid
43. Perbedaan Pendapat Itu Rahmat
44. Sukses Dengan Usaha Dan Doa
45. Nabi Muhammad Dicinta Semua Makhluk
46. Potret Estafet Pemimpin Umat
47. Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga
48. Rahasia Sukses Dibalik Kesabaran
49. Bukti Cinta Kepada Allah dan Rasul
50. Menjaga Diri Dari Penyakit Hati
51. Menerapkan Hadits Dalam Kehidupan
52. Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional ❖

TANYA JAWAB FIKIH ISLAM

Hukum Meninggalkan Shalat

Pertanyaan :
Apa hukumnya orang yang sengaja meninggalkan shalat?

Jawaban:
Shalat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Shalat merupakan amalan yang akan pertama kali *dihisab* oleh Allah di hari Akhir nanti. Shalat merupakan pembeda antara muslim dengan kafir. Maka barangsiapa yang meninggalkan shalat, berarti ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, dan ini merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar.
Dalilnya adalah :

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ

Artinya: *"Pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

Artinya: *"(Pembatas) antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat."* (HR. Muslim).

Maka orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja karena mengingkari wajibnya shalat hukumnya adalah kafir, murtad, dan keluar dari Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama, karena berarti ia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab Radhiyallahu 'Anhu pernah berkata bahwa sesungguhnya tidak ada bagian apapun dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat. Jadi salah besar bila ada orang yang beranggapan bahwa keislamannya cukup dengan hati atau yang terpenting hatinya yang shalat, dsb. *Wallahu a'lam.*❖

Sumber rujukan :
Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, pada bab Shalat.

Prabowo Ditantang Imami Shalat

"Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam lebih hebat Pak Jokowi. Pak Prabowo berani mimpin shalat? Enggak berani."

Begitu pernyataan La Nyalla pada hari Selasa 11 Desember 2018 di Jalan Situbondo 12, Jakarta Pusat. Ia mengeluarkan pernyataan itu bukan tanpa dasar, sebagai orang yang pernah berada satu kubu dan menjadi tim pemenangan Prabowo di 2014 jelas memiliki data. Paling tidak, ia mengetahui keseharian saat mendampingi kampanye-kampanye Prabowo.

Tantangan matan kader Gerindra untuk Prabowo menjadi imam shalat merupakan ujian bagi calon yang katanya didukung umat. Jelas hal ini menurutnya menguji sejauhmana keislaman Parbowo, karena shalat bagi muslim adalah wajib.

"Ayo kita uji keislamannya Pak Prabowo. Suruh Pak Prabowo baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baca-bacaan shalat," imbuhnya dengan tegas dan berani.

Menilik pernyataan La Nyalla itu, sebenarnya memang bukan merupakan hal yang baru dan mengherankan lagi. Prabowo sendiri pernah menyatakan dirinya bukanlah orang yang terlalu taat menjalankan ritual (agama). Hal itu diungkapkannya awal Oktober 2013, saat Prabowo bersama timnya berkunjung ke kantor redaksi *Tempo* di Kebayoran Center, Mayestik, Jakarta Selatan.

Prabowo pribadi saja mengakui kalau tidak terlalu taat menjalankan perintah agama, kalau ada yang berusaha membela dengan mengungkapkan segala hal sebagai pembenaran merupakan sebuah hal yang lucu. Teman satu koalisi dan pendukungnya sendiri yaitu Sohibul Iman, Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagaimanan dikutip dalam berita di *Republika,* juga mengatakan kalau Prabowo bukan muslim yang taat. Hal itu disampaikan ketika menerima kunjungan Duta Besar Belanda.

Bukanlah sebuah kebetulan segala yang terungkap di atas, bahkan sangat jelas. Artinya dengan fakta-fakta di atas kita sudah bisa menilai dan menakar sendiri seberapa bobot keislaman Prabowo.

Fakta lainnya adalah seperti disampaikan Putra tokoh NU, KH. Salahuddin Wahid, Irfan Asy'ari Sudirman yang dituliskan di Twitter dan membuat he-boh pada tahun 2014, dimana saat itu Prabowo menjadi Capres dan Yenny Wahid menjadi salah satu pendukung-nya.

Gus Ipang, sapaan akrab Irfan Asy'ari Sudirman, menuliskan bahwa ada capres yang berkunjung ke PBNU dan diminta jadi imam shalat. Tetapi Capres itu justru meminta Yenny Wahid jadi imam shalat dengan alasan anak kyai. Sungguh sangat lucu memang, Gus Ipang meneruskan keterangannya di Twitter, bahwa berdasarkan mazhab Syafi'i dan kesepakatan ulama tidak ada imam shalat seorang wanita.

Terakhir, pengakuan Eggy Sudjana yang saat awal-awal pengajuan calon kekeuh menginginkan Ustadz Abdul Somad (UAS) menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo. Ia membujuk UAS supaya mau menjadi Cawapres Prabowo, "Kalau jadi Wapres Prabowo bisa ngajarin Prabowo ngaji" kata Eggy yang juga Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) saat menghadiri diskusi di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018) dikutip dari *detik.com*. Secara tidak langsung Eggy menyatakan kalau sebenarnya Prabowo belum bisa mengaji.

Demikian fakta-fakta yang bisa menjadi rujukan dan bahan pertimbangan akal sehat kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah terbaik dan terhindar dari segala hal yang menyesatkan.❖

TABLOID INDONESIA BAROKAH
EDISI I/DESEMBER 2018

Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang

Tampak Depan, Masjid Raya Sumatera Barat
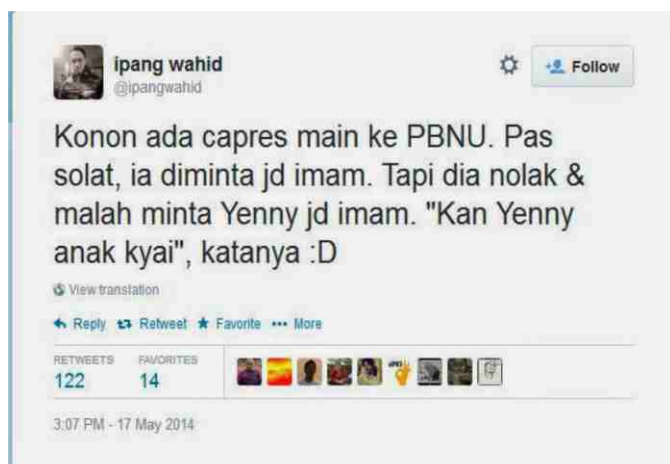
Kemegahan Arsitektur Masjid Raya Sumatera Barat

Terinspirasi dari tiga simbol: sumber mata air (*the springs*: unsur alam), bulan sabit, dan Rumah Gadang. Memperlihatkan integrasi sejarah Islam, konteks Padang dan tradisinya. *'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah'* artinya Adat Minangkabau diperkuat ajaran Islam seperti kokoh rumah karena sandinya.

Lokasi

Masjid Raya Sumatera Barat adalah masjid terbesar di Sumatera Barat, terletak menghadap Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Pembangunan

Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat menempati area seluas 40.343 meter persegi di perempatan Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Ahmad Dahlan. Bangunan utama yakni masjid terdiri dari tiga lantai dengan denah seluas 4.430 meter persegi. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan dilakukan pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi.

Arsitektur

Arsitektur Masjid Raya Sumatera Barat memakai rancangan yang dikerjakan oleh arsitek Rizal Muslimin, pemenang sayembara desain yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara pada 2007. Dari ratusan peserta, 71 desain masuk sebagai nominasi dan diseleksi oleh tim juri yang diketuai oleh sastrawan Wisran Hadi. Konstruksi bangunan dirancang menyikapi kondisi geografis Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. Menurut rancangan, kompleks bangunan akan dilengkapi pelataran, taman, menara, ruang serbaguna, fasilitas komersial, dan bangunan pendukung untuk kegiatan pendidikan.

Masjid Raya Sumatera Barat menampilkan arsitektur modern yang tak identik dengan kubah. Atap bangunan menggambarkan bentuk bentangan kain yang digunakan untuk mengusung batu Hajar Aswad. Ketika empat kabilah suku Quraisy di Mekkah berselisih pendapat mengenai siapa yang berhak memindahkan batu Hajar Aswad ke tempat semula setelah renovasi Kakbah, Nabi Muhammad memutuskan meletakkan batu Hajar Aswad di atas selembar kain sehingga dapat diusung bersama oleh perwakilan dari setiap kabilah dengan memegang masing-masing sudut kain.

Fasilitas

Parkir, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Kantor Sekretariat, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah.

Kegiatan

Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.❖

Sumber: MinangTourism

Senyumin Aja

REUNI 212

SAYA TIDAK BICARA KAMPANYE... TAPI SAYA CUMA BLA BLA BLA...

KALO BUKAN KAMPANYE, KOK HANYA DITEMANI PIMPINAN PARTAI POLITIK, PAK?